

**Dinas Perdagangan, Perindustrian dan  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Buleleng**



**LKjIP  
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)  
Tahun 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmatnya dan Karunianya sehingga laporan ini dapat terselesaikan sesuai rencana. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Kinerja Aparatur menuju *Good Governance* dengan mengacu pada RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

LKjIP Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja, dimana setiap unit organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi Pemerintahan Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2021, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Buleleng membuat Dokumen LKjIP ini sebagai salah satu bentuk dari tanggungjawab organisasai yang akuntabel dan transparan.

Diharapkan Dokumen LKjIP Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng untuk dapat meningkatkan kinerjanya masing-masing yang akan datang.

Singaraja, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



**Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si**

19741014 199311 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi pelaksanaan dibidang perdagangan dan perindustrian. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022, RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

Peran strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi adalah Meningkatkan Sektor Perdagangan yang Berkualitas, Meningkatkan Sektor Perindustrian yang Mandiri, Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas dan Terwujudnya UMKM yang Mandiri. Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah telah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta misi yang diembannya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, secara umum sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian atau realisasi terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Rata-rata Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	100%	Sangat Berhasil
		Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	100%	Sangat Berhasil
		Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	100%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	100%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	100%	Sangat Berhasil
5	Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	100%	Sangat Berhasil
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	100%	Sangat Berhasil

Beberapa faktor keberhasilan yang menunjang pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

#### A. Urusan Perdagangan

- 1) Pembinaan Tertib Niaga pada Hari-hari besar keagamaan terhadap toko modern, pasar tradisional dan mini market yang tersebar di 9 Kecamatan Buleleng.
- 2) Menerbitkan rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG).
- 3) Menindaklanjuti Temuan Loka POM Kab. Buleleng terhadap produk pangan kadaluwarsa dan produk kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE).
- 4) Pembinaan kepada PKL, pengelola dan pedagang pasar.

- 5) Terlaksananya pendataan terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok di 14 agen di Kabupaten/Kota dan pemantauan stok kebutuhan pokok yang terdiri di 20 komoditi.
- 6) Terlaksananya pemantauan harga di 2 pasar, yaitu Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri.
- 7) Pelaksanaan pameran produk unggulan daerah.
- 8) Peningkatan monitoring dan pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya).
- 9) Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Tera dan Tera Ulang di 9 Kecamatan.
- 10) Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang berkaitan dengan UTTP serta peredaran barang dan jasa.

**B. Urusan Perindustrian**

1. Monitoring dan Pendampingan Pelatihan terhadap IKM.
2. Penyelenggaraan pergelaran produk IKM.

**C. Urusan Koperasi**

1. Sosialisasi terkait prinsip-prinsip perkoperasian.
2. Penyelenggaraan diklat/pelatihan terhadap pengurus/pengelola koperasi.
3. Penyelenggaraan RAT Koperasi.
4. Meningkatnya jumlah koperasi yang berkembang sesuai dengan regulasi.
5. Penyelenggaraan temu mitra koperasi.
6. Penyelenggaraan pendampingan terhadap koperasi riil.

**D. Urusan Pengembangan Usaha Mikro**

1. Memfasilitasi kelompok UMKM untuk akses permodalan, sehingga dapat lebih mengembangkan usahanya.
2. Memfasilitasi pelaku UMKM dalam promosi produk.
3. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.

**E. Aspek Kelembagaan**

1. Operasional Pelayanan Kantor

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat untuk menjamin lancarnya kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Program dan kegiatan rutin perkantoran, dimana selama Tahun 2021 operasional pelayanan perkantoran berjalan secara lancar.

## 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan bagi Instansi Pemerintah termasuk Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memiliki fungsi yang sangat vital. Dokumen dimaksud bukan lagi sekedar untuk pengklasifikasian kegiatan dan anggaran, tetapi memiliki legalitas sebagai dasar hukum bagi Instansi Pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dengan demikian, dukungan terhadap penyusunan dokumen-dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian masing-masing yang serius. Setiap tahun Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menyusun 5 Dokumen Perencanaan yaitu RENJA, RKA, DPA, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan.

Dalam pencapaian kinerja tersebut, jumlah anggaran yang digunakan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran APBD sebesar **Rp 10.506.920.831,00** dan Realisasi **Rp 10.233.445.125,00** atau **97,39%**. Penyerapan anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng secara rinci, diuraikan sebagai berikut :

No.	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>5.712.832.935</b>	<b>5.678.883.262</b>	<b>99,40</b>
	- Belanja Pegawai	5.712.832.935	5.678.883.262	99,40
2.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>4.794.187.896</b>	<b>4.554.561.863</b>	<b>95,00%</b>
	- Belanja Barang dan Jasa	4.516.387.896	4.279.740.363	94,76%
	- Belanja Hibah	205.000.000	205.000.000	100%
	- Belanja Modal	72.800.000	69.821.500	95,90%
<b>Jumlah 1 + 2</b>		<b>10.506.920.831</b>	<b>10.233.445.125</b>	<b>97,39%</b>

Demikian ringkasan eksekutif Dokumen LKjIP Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



**Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si**

NIP. 19741014 199311 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
DAFTAR TABEL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng .....	4
1. Tugas Pokok .....	4
2. Fungsi.....	4
D. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.....	5
E. Sumber Daya Aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng .....	6
F. Aset yang Dikelola .....	7
G. Keberhasilan / Prestasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng .....	9
1. Urusan Perindustrian.....	9
2. Urusan Koperasi .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis ( RENSTRA ).....	11
1. Pernyataan Visi Kepala Daerah .....	12
2. Pernyataan Misi Kepala Daerah .....	13
3. Tujuan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng .....	14
4. Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng .....	15
5. Program dalam Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .....	25

6. Program Penunjang.....	27
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 .....	28
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	41
D. Rencana Anggaran Tahun 2021.....	55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	64
A. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	65
B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS.....	65
1.1 Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas” .....	67
1.2 Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri” .....	86
1.3 Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah” .....	90
1.4 Sasaran Strategis 4 : “Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas” .....	96
1.5 Sasaran Strategis 5 : “Terwujudnya UMKM yang Mandiri” .....	114
C. PROGRAM PENUNJANG .....	122
D. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2021 .....	125
E. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	126
F. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ).....	128
BAB IV PENUTUP .....	130

## DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN .....	6
TABEL 1. 2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN .....	6
TABEL 1. 3 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKANNYA .....	7
TABEL 1. 4 ASET DINAS.....	8
TABEL 2. 1 TUJUAN DINAS .....	14
TABEL 2. 2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR.....	15
TABEL 2. 3 RENCANA STRATEGIS DINAS.....	17
TABEL 2. 4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) .....	29
TABEL 2. 5 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021 .....	43
TABEL 2. 6 PENETAPAN KINERJA DINAS.....	44
TABEL 2. 7 ANGGARAN BELANJA DINAS .....	55
TABEL 2. 8 SUMBER DANA BELANJA LANGSUNG .....	56
TABEL 2. 9 ALOKASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG.....	57
TABEL 3. 1 PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS .....	66
TABEL 3. 2 TINGKAT CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 TAHUN 2021 .....	68
TABEL 3. 3 PROGRAM PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 1 .....	68
TABEL 3. 4 TINGKAT CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2 TAHUN 2021 .....	86
TABEL 3. 5 PROGRAM PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 2 .....	87
TABEL 3. 6 TINGKAT CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 .....	90
TABEL 3. 7 PROGRAM PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN 3 .....	91
TABEL 3. 8 TINGKAT CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 .....	96
TABEL 3. 9 PROGRAM PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 4 .....	97
TABEL 3. 10 TINGKAT CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 .....	114
TABEL 3. 11 PROGRAM PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS 5 .....	115

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat. Hal ini menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi, akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan, sebagai upaya dalam rangka mewujudkan *good governance* dan kebijakan pemerintah pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

LKjIP disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam dokumen LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RENSTRA SKPD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan kinerja Tahun 2021 yaitu tahun ketiga Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 –2022.

Salah satu tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan

Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan didalam urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Dalam urusan perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan Monitoring stok bahan pokok strategis di Pasar Rakyat dan Gudang Penyimpanan; Pelaksanaan monitoring dan pembinaan pedagang secara berkala; Peningkatan monitoring dan pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya); Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Tera dan Tera Ulang di 9 Kecamatan; Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang berkaitan dengan UTTP serta peredaran barang dan jasa; serta Pembinaan dan pengawasan perijinan dan non perijinan terhadap pasar modern dan mini market.

Dalam urusan perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan monitoring dan pendampingan terhadap 7 desa sentra IKM dan pendampingan IKM binaan dalam rangka usulan sertifikasi halal.

Selanjutnya dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait prinsip-prinsip perkoperasian; Penyelenggaraan diklat/pelatihan terhadap pengurus/pengelola koperasi; Sosialisasi pendampingan koperasi riil, Pendampingan koperasi sector riil bidang koperasi; Melaksanakan kegiatan Festival Kopi dan Gebyar Kuliner yang dibarengi dengan kegiatan pelatihan terhadap pelaku UMKM, Memfasilitasi pengajuan BPUM

Dengan demikian sebagai Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng wajib untuk menyampaikan dokumen LKjIP sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai perwujudan kewajiban dari Instansi Pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng**

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Perkoperasian dan Pengembangan Usaha Mikro. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan serta penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok**

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

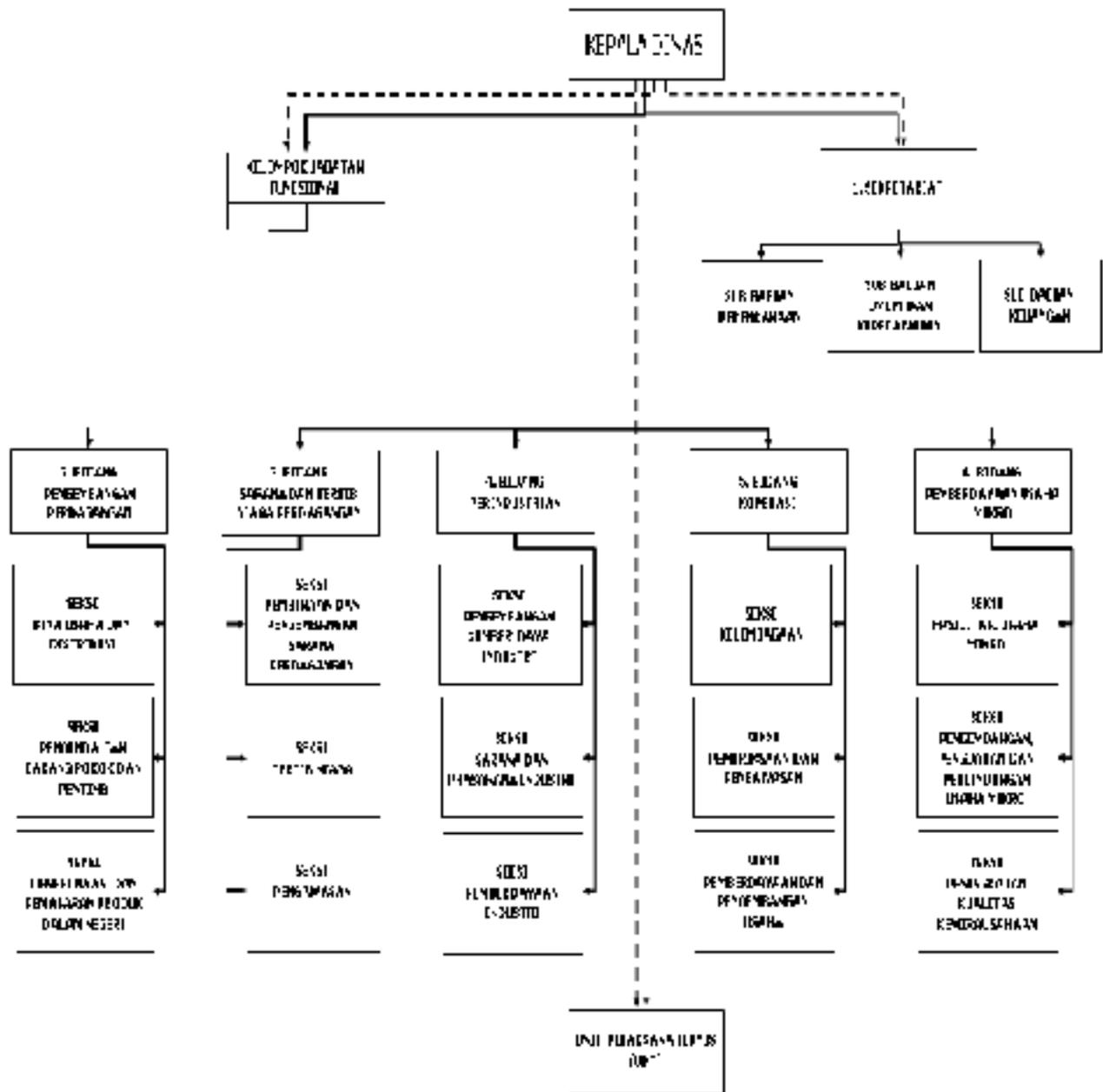
#### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian dan usaha kecil dan menengah.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian dan usaha kecil dan menengah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, perindustrian, perkoperasian dan usaha kecil dan menengah.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## D. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Bagan susunan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, terdiri dari:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

## E. Sumber Daya Aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng didukung oleh 122 orang pegawai di Tahun 2021 dengan rincian 48 orang PNS, 73 orang tenaga kontrak dan 1 orang Honor Daerah. Adapun uraian Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

### 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dilihat dari golongannya, komposisi pegawai pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

Status Kepegawaian (Orang)	2017		2018		2019		2020	2021
	Diskop ukm	Disdag perin	Diskop ukm	Disdag perin	Diskop ukm	Disdag perin	Disdagperin kopukm	Disdagperin kopukm
CPNS	0	0	0	0	1	0	0	0
PNS	28	45	28	44	30	36	52	48
Honor Daerah	1	0	1	0	1	0	1	1
Tenaga Harian Lepas	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontrak	32	27	34	28	39	34	74	73
<b>Total (Orang)</b>	<b>61</b>	<b>72</b>	<b>63</b>	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>127</b>	<b>122</b>

#### a) Komposisi PNS berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, komposisi pegawai pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

Status Pegawai Berdasarkan Golongan (Orang)	2017		2018		2019		2020	2021
	Diskop ukm	Disdag perin	Diskop ukm	Disdag perin	Diskop ukm	Disdag perin	Disdag perinkop ukm	Disdagperin kopukm
Golongan I	0	1	0	1	0	1	9	1
Golongan II	9	9	8	8	14	6	29	12
Golongan III	15	28	15	29	10	23	12	29
Golongan IV	4	7	5	6	6	6	1	6
<b>Total (Orang)</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>48</b>

**b) Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikannya**

Jumlah pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagai berikut :

**Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikannya**

Status berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)	2017		2018		2019		2020	2021
	Diskop ukm	Disdag perin	Diskop ukm	Disdag perin	Diskop ukm	Disdag perin	Disdagperin kopukm	Disdagperin kopukm
Magister (S2)	1	2	1	2	1	2	3	3
Sarjana (S1)	13	23	15	22	17	21	31	27
Sarjana Muda	1	1	0	1	0	1	2	-
Diploma IV	-	-	-	-	-	-	-	1
Diploma III	-	-	-	-	-	-	-	1
SMU (Sederajat)	13	18	12	18	1	11	15	15
SLTP (Sederajat)	-	-	-	-	11	-	0	-
SD (Sederajat)	-	1	0	1	0	1	1	1
<b>Total (Orang)</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>48</b>

**F. Aset yang Dikelola**

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa aset yang perlu dikelola dan dipelihara. Sarana prasarana tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Keadaan aset yang dikelola oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel Aset Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng didukung oleh 122 orang pegawai di Tahun 2021 dengan rincian 48 orang PNS, 72 orang tenaga kontrak dan 1 orang Honor Daerah. Adapun uraian Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

**Tabel 1. 4 Aset Dinas  
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Buleleng Tahun 2020 s/d 2021**

**A. Tahun 2020**

No.	Sub Kelompok Aset	Jumlah	Total Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	1 Lokasi	34.675.000,00
2	Peralatan dan Mesin	963 Unit	5.747.068.894,32
3	Gedung dan Bangunan	19 Unit	10.896.530.740,66
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3 Unit	98.001.050,00
5	Aset Tetap Lainnya	128 unit	28.775.550,00
6	Aset Tidak Berwujud	3 Unit	68.530.000,00
<b>Total</b>		<b>1.117 Unit</b>	<b>16.873.581.234,98</b>

**B. Tahun 2021**

No.	Sub Kelompok Aset	Jumlah	Total Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	1 Lokasi	34.675.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.265 Unit	5.862.896.141,58
3	Gedung dan Bangunan	15 Unit	3.861.505.500,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3 Unit	98.001.050,00
5	Aset Tetap Lainnya	197 unit	40.843.650,00
<b>Total</b>		<b>1.478 Unit</b>	<b>9.897.921.341,58</b>

## **G. Keberhasilan / Prestasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng**

Keberhasilan yang telah dicapai Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 s/d 2021 telah mendapatkan beberapa penghargaan baik dalam urusan perdagangan maupun perindustrian. Adapun uraian dari keberhasilan/ prestasi yang diperoleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

### **1. Urusan Perindustrian**

- a) Ketut Sukra Wenten, sebagai Juara III Tingkat Nasional dalam Rangka Lomba Tudung Saji yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional.



- b) I Made Sadnyana, yang masuk 30 besar Tingkat Nasional dalam Rangka Lomba Tudung Saji yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional.



- c) I Putu Suryasa, yang masuk 30 besar Tingkat Nasional dalam Rangka Lomba Tudung Saji yang diselenggarakan oleh Kementrian Perindustrian bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional.



**2. Urusan Koperasi**

- a) KUD Dharma Prawerti, sebagai Juara II sebagai Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi
- b) KPN Widya Karma, sebagai Juara III sebagai Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi
- c) Tahun 2021 KUD Dharma Prawerti dan KPN Widya Karma yang merupakan binaan Kabupaten Buleleng mendapat penghargaan sebagai koperasi terbaik unit usaha produksi, konsumen dan simpan pinjam.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah membuat dan menetapkan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian tersebut merupakan wujud komitmen penerima amanah serta kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Kinerja yang telah disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

### A. Rencana Strategis ( RENSTRA )

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2017 – 2022 ditetapkan dengan Penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Buleleng dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Disamping itu pula, Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan hasil kesepakatan bersama.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Pernyataan Visi Kepala Daerah**

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta para pemangku kepentingan maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, Pemerintah Daerah mencanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

**“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”**

**VISI**

Visi tersebut bermakna sebagai berikut:

- 1) **Mandiri** mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) **Sejahtera** mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
- 3) **Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
- 4) **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan. Demikian juga SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai kewajiban untuk mewujudkannya melalui Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Tupoksi Dinas serta searah dan selaras dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mendukung Visinya.

## 2. Pernyataan Misi Kepala Daerah

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi untuk 5 tahun kedepan sebagaimana di uraikan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
- 2) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
- 4) Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
- 5) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik; dan

- 6) Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

### 3. Tujuan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Tujuan Dinas**

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Misi Kepala Daerah	Tujuan SKPD
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;</li> <li>2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;</li> <li>3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;</li> <li>4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;</li> <li>5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;</li> <li>6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UMKM yang Berdaya Saing</p>

#### 4. Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi Program/Kegiatan. Adapun tujuan beserta uraian Sasaran dan Indikator sasaran Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator**  
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021

TAHUN 2020				TAHUN 2021			
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UMKM yang Berdaya Saing	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	78 Pasar	Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UMKM yang Berdaya Saing	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	81 Pasar
		Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	54,91%			Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	55%
		Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	80%			Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian	81%

						BDKT dan B2		
Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase IKM yang Berijin	1,50%		Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	80%		
	Persentase IKM yang Meningkatkan Statusnya	1,50%			Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	76,79%	
	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	85,50%			Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Sehat dan Aktif	77,5%
		Persentase Koperasi Sehat/Cukup Sehat	77%			Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	26%
	Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	25%				Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	1,3%
			Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya		1%			

**Tabel 2. 3 Rencana Strategis Dinas**

**RPJMD Kabupaten Buleleng  
Periode 2017-2022**

Visi Kepala Daerah	Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana
Misi Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;</li><li>2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;</li><li>3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;</li><li>4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;</li><li>5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;</li><li>6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (Sustainable Development).</li></ol>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha informal;</li><li>2. Meningkatkan sebaran industri pengolahan;</li></ol>
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal;</li><li>2. Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industri;</li></ol>

**IKU DAERAH KABUPATEN BULELENG  
RPJMD KABUPATEN BULELENG  
PERIODE 2017-2022**

No	Instansi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Per Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	Berkembangnya Produk Unggulan Daerah	Persentase pertumbuhan industri pengolahan pada PDRB	%	74,74	75,29	-	-	-
			Persentase kelompok binaan yang berhasil	%	73,00	76,00	-	-	-
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupate Buleleng	Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing	Persentase Koperasi Aktif	%	85	85,5	-	-	-
			Persentase Pertumbuhan UMKM	%	4,77	4,78	-	-	-
3	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing	Jumlah Pasar Kondisi Baik	Pasar	-	-	78	81	84
			Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	%	-	-	54,91	55	56
			Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/ Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	%	-	-	80	81	82

			Persentase IKM yang Berijin	%	-	-	1,50	1,50	1,50
			Persentase IKM yang Meningkatkan Statusnya	%	-	-	1,50	1,50	1,50
			Persentase Koperasi Aktif	%	-	-	85,50	85,60	85,70
			Persentase Koperasi Sehat/ Cukup Sehat	%	-	-	77	77,5	78
			Persentase UMKM yang Formal	%	-	-	25	26	27
			Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	%	-	-	1	1,3	1,5
4	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing	Jumlah Pasar Kondisi Baik	Pasar	-	-	78	81	84
			Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	%	-	-	54,91	55	56
			Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/ Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	%	-	-	80	81	82
			Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	%	-	-	-	80%	81%
			Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	%	-	-	-	76,79	77,74%
			Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	%	-	-	-	77,5	78

			Persentase UMKM yang Formal	%	-	-	25	26	27
			Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya		-	-	1	1,3	1,5

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BULELENG  
PERIODE 2017-2022**

No	Instansi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng	Terwujudnya Sektor Perdagangan dan Perindustrian yang Berdaya Saing	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Sektor	8	8	-	-	-
			Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase IKM yang Berizin	%	1,40	1,50	-	-	-
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang Berdaya Saing	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	%	1,40	1,50	-	-	-
				Persentase Sehat/Cukup Sehat	%	85	85,5	-	-	-
			Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal/Berijin	%	100	100	-	-	-
				Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	%	100	100	-	-	-

No	Instansi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
3	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UMKM yang Berdaya Saing	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	Pasar	-	-	78	81	84
				Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	%	-	-	54,91	55	56
				Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	%	-	-	80	81	82
			Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Pertumbuhan IKM yang Berijin atau Formal	%	-	-	1,50	1,50	1,50
				Persentase IKM yang Meningkatkan Statusnya	%	-	-	1,50	1,50	1,50

No	Instansi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
			Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif	%	-	-	85,50	85,60	85,70
				Persentase Koperasi Sehat/Cukup Sehat	%	-	-	77	77,5	78
			Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	%	-	-	25	26	27
				Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	%	-	-	1	1,3	1,5
4	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UMKM yang Berdaya Saing	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	Pasar	-	-	78	81	84
				Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	%	-	-	54,91	55	56
				Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/ Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	%	-	-	80	81	82

No	Instansi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
			Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	%	-	-	-	80%	81%
				Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	%	-	-	-	76,79	77,74%
			Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	%	-	-	-	77,5	78
			Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	%	-	-	25	26	27
				Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya		-	-	1	1,3	1,5

## 5. Program dalam Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, kebijakan pada Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diarahkan pada (1) Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal; (2) Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industri; (3) Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM dan Koperasi. Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

- 1) **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**, kegiatan Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**, kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3) **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**, kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 4) **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**, kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
- 5) **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**, kegiatan Pemberdayaan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas,

Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 6) **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**, kegiatan Pemberdayaan usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, sub kegiatan (1) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, (2) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro, (3) Fasilitasi Kemeduhan Perizinan Usaha Mikro, (4) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, (5) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.
- 7) **Program Pengembangan UMKM**, kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasarana, SDM serta Desain dan Teknologi.
- 8) **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**, kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang , sub kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
- 9) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan**, kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
- 10) **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**, kegiatan (1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat; (2) kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- 11) **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**, kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan,

sub kegiatan (1) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, (2) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

- 12) **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**, kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.
- 13) **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**, kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sub kegiatan (1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dan (2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat.
- 14) **Program Pengendalian Izin Usaha Industri**, kegiatan Penerbitan Izin Usaha (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) DAN Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan KOMitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegritas secara Elektronik berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

## **6. Program Penunjang**

Program ini dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan dari program prioritas atau program wajib yang dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 Kabupaten Buleleng. Adapun program tersebut, antara lain:

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  - **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, sub kegiatan (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, sub kegiatan (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan (2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, sub kegiatan (1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, sub kegiatan (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, (3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, (5) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, sub kegiatan (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, (3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan (4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, sub kegiatan (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

## **B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021**

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

**Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator output	Target	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)						Fisik	Keuangan
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	77,5%	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen permohonan ijin usaha simpan pinjam	15 Koperasi	65.864.830
						Jumlah dokumen permohonan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	1 Koperasi	
						Jumlah berkas pembubaran koperasi	45 Koperasi	
						Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek pembuatan laporan tahunan	160 Koperasi	

						koperasi		
						Jumlah monev pemberdayaan koperasi	160 Laporan	
						Jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang di analisis datanya	160 Koperasi	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus / pengelola koperasi yang mengikuti diklat	90 Orang	310.900.622
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah koperasi dengan bantuan modal dari pihak ketiga	20 Koperasi	107.078.425
						Jumlah koperasi yang memasarkan	20 Koperasi	

					Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	produk usaha Jumlah koperasi produksi, koperasi konsumsi dan koperasi jasa lainnya	20 Koperasi	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang berkembang sesuai dengan regulasi	30 Koperasi	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu)	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai tingkat kesehatannya	50 Koperasi	67.804.324
						Jumlah monev kelembagaan koperasi dan usaha koperasi	30 Laporan	

				Daerah Kabupaten/Kota				
Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	26%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi akses penerbitan IUMK melalui OSS	270 UMKM	206.724.200
	Persentase UMKM yang Meningkat Statusnya	1,3%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah database UMKM Kabupaten Buleleng	916 UMKM	88.476.945
					Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapatkan dukungan informasi penyediaan	50 UMKM	57.221.980

				dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		permodalan		
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang di diklat	60 Pelaku UMKM	227.506.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah central UMKM yang dibina	5 Central	208.110.025
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah produk UMKM yang difasilitasi akses pemasarannya	45 Produk	57.521.100
						Jumlah UMKM yang memanfaatkan IT	90 UMKM	
Meningkatnya Sektor Perdagangan yang	Jumlah Pasar Kondisi Baik	81 Pasar	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Unit Usaha yang dibina dan difasilitasi	48 Unit Usaha	150.467.580

Berkualitas			PERUSAHAAN			Kegiatan Tertib Niaga		
	Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	55%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah laporan pemberian rekomendasi pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan	12 Laporan	676.651.880
						Jumlah laporan pembinaan pengelola pasar dan pedagang	12 Laporan	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah sub distributor stok barang kebutuhan pokok barang penting	14 sub distributor	45.639.050
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Jumlah data pemantauan distribusi dan	2 Laporan	86.611.280

				Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting		
						Jumlah data pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting	2 Laporan	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan daerah	10 Produk Unggulan	272.101.355
						Jumlah promosi produk lokal/unggulan daerah	4 promosi	
	Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	81%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP (Takar, Ukur, Timbang dan Perlengkapannya) bertera ulang	8000 UTTP	215.158.790
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah BDKT yang diawasi	30 BDKT	82.526.000

						Jumlah UTTP yang diawasi	500 UTTP	
Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	80%	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	Jumlah IKM yang terfasilitasi permohonan pemenuhan komitmen	30 IKM	161.426.560
						Persentase ijin yang dipantau	80%	
						Jumlah data IKM yang sudah di olah dan dianalisis	12 IKM	
						Jumlah IKM yang terpublikasi pada SIINas	12 IKM	
						Jumlah laporan monev SIINas	1 Laporan	
						Jumlah IKM/sentra yang mendapat fasilitasi sarana dan prasarana	1 IKM	

Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	76,79%	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen RPIK	1 Dokumen	148.193.370
						Jumlah sentra/IKM yang mendapat dampingan	5 Sentra	
						Jumlah laporan monev kegiatan pembangunan industri	1 Laporan	
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM/sentra yang mendapat fasilitasi sertifikasi dan promosi	5 IKM	211.219.300
<b>PROGRAM PENUNJANG</b>								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	7 Dokumen	101.694.576
						Jumlah dokumen SAKIP	7 Dokumen	
						Jumlah dokumen SOP dan SP	2 Dokumen	

					Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	7 Dokumen	5.715.832.935
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			33.815.826
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	7 Dokumen	72.800.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan tata kelola administrasi perkantoran SKPD	12 Laporan	58.022.200
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2 Dokumen	6.387.500

					(SPIP)			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu			15.624.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60.128.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			42.037.897
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			181.360.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			239.223.334
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			173.067.365
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	12 Laporan	11.333,900
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana			28.820.000

					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
<b>TOTAL</b>								<b>10.506.920.831</b>

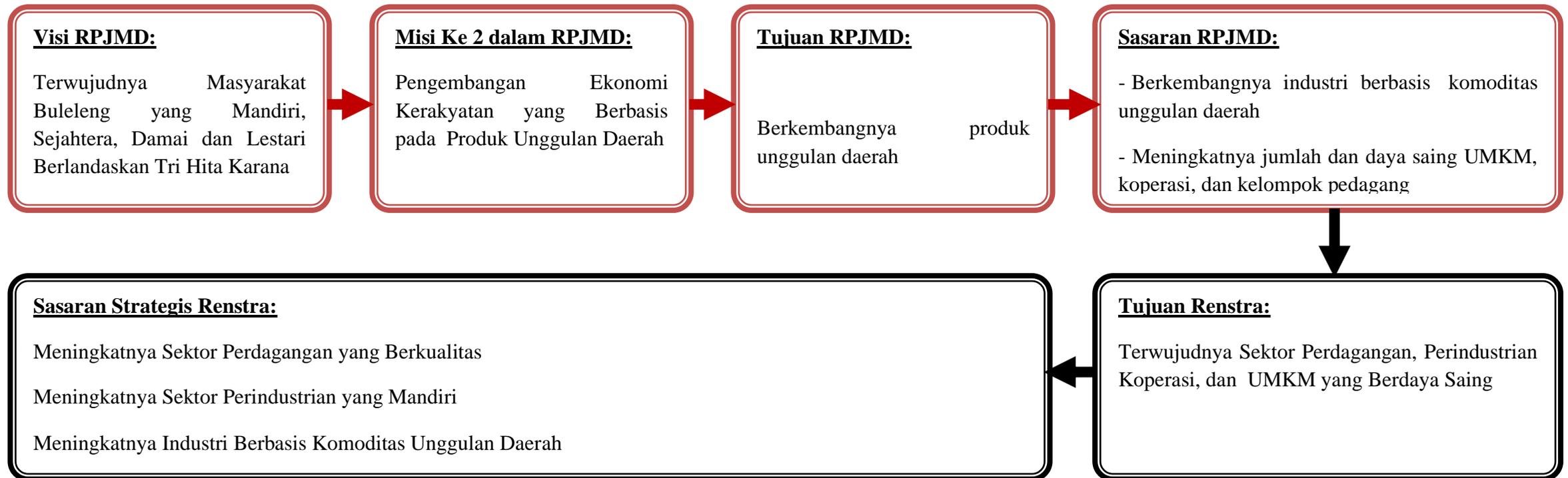
### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, Dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng 2017-2022, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2021.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan dan sasaran Renstra yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut Penjabaran misi Kepala Daerah dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD serta penjabarannya dalam Tujuan, dan Sasaran Renstra, sebagai berikut:

Bagan 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



**Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	81 Pasar
		Persentase PKL Tata Kelola Sesuai Aturan	55%
		Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	81%
2	Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	80%
3	Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	76,79%
4	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	77,5%
5	Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	26%
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	1,3%

**Tabel 2. 6 Penetapan Kinerja Dinas**

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Output	Target	Pagu
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen permohonan ijin usaha simpan pinjam	15 Koperasi	65.864.830
					Jumlah dokumen permohonan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	1 Koperasi	
					Jumlah berkas pembubaran koperasi	45 Koperasi	
					Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek pembuatan laporan tahunan koperasi	160 Koperasi	
					Jumlah monev pemberdayaan koperasi	160 Laporan	
					Jumlah koperasi serta	160 Koperasi	

					koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang di analisis datanya		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus / pengelola koperasi yang mengikuti diklat	90 Orang	310.900.622
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi dengan bantuan modal dari pihak ketiga	20 Koperasi	107.078.425
					Jumlah koperasi yang memasarkan produk usaha	20 Koperasi	
					Jumlah koperasi produksi, koperasi konsumsi dan koperasi jasa lainnya	20 Koperasi	
		PROGRAM PENGAWASAN	Pemeriksaan dan Pengawasan	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,	Jumlah koperasi yang berkembang sesuai	30 Koperasi	

		DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	dengan regulasi		
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai tingkat kesehatannya	50 Koperasi	67.804.324
					Jumlah monev kelembagaan koperasi dan usaha koperasi	30 Laporan	
Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan,	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi akses penerbitan IUMK melalui OSS	270 UMKM	206.724.200

		DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah database UMKM Kabupaten Buleleng	916 UMKM	88.476.945	
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapatkan dukungan informasi penyediaan permodalan	50 UMKM	57.221.980	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku UMKM yang di diklat	60 Pelaku UMKM	227.506.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	Jumlah central UMKM yang dibina	5 Central	208.110.025	

				Usaha Mikro			
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah produk UMKM yang difasilitasi akses pemasarannya	45 Produk	57.521.100
					Jumlah UMKM yang memanfaatkan IT	90 UMKM	
Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Unit Usaha yang dibina dan difasilitasi Kegiatan Tertib Niaga	48 Unit Usaha	150.467.580
	Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah laporan pemberian rekomendasi pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan	12 Laporan	676.651.880
					Jumlah laporan pembinaan pengelola pasar dan pedagang	12 Laporan	

		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah sub distributor stok barang kebutuhan pokok barang penting	14 sub distributor	45.639.050
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah data pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	2 Laporan	86.611.280
					Jumlah data pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting	2 Laporan	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah produk unggulan daerah	10 Produk Unggulan	272.101.355
					Jumlah promosi produk lokal/unggulan daerah	4 promosi	

	Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP (Takar, Ukur, Timbang dan Perlengkapannya) bertera ulang	8000 UTTP	215.158.790
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah BDKT yang diawasi	30 BDKT	82.526.000
					Jumlah UTTP yang diawasi	500 UTTP	
Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang terfasilitasi permohonan pemenuhan komitmen	30 IKM	161.426.560
					Persentase ijin yang dipantau	80%	
					Jumlah data IKM yang sudah di olah dan dianalisis	12 IKM	
					Jumlah IKM yang terpublikasi pada SIINas	12 IKM	
					Jumlah laporan monev SIINas	1 Laporan	

					Jumlah IKM/sentra yang mendapat fasilitasi sarana dan prasarana	1 IKM	
Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen RPIK	1 Dokumen	148.193.370
					Jumlah sentra/IKM yang mendapat dampingan	5 Sentra	
					Jumlah laporan monev kegiatan pembangunan industri	1 Laporan	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM/sentra yang mendapat fasilitasi sertifikasi dan promosi	5 IKM	211.219.300
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	7 Dokumen	101.694.576
					Jumlah dokumen SAKIP	7 Dokumen	
					Jumlah dokumen SOP dan SP	2 Dokumen	

					Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7 Dokumen	5.715.832.935
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran		33.815.826
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	7 Dokumen	72.800.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan tata kelola administrasi perkantoran SKPD	12 Laporan	58.022.200
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 Dokumen	6.387.500

				Fasilitasi Kunjungan Tamu			15.624.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60.128.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			42.037.897
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			181.360.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			239.223.334
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			173.067.365
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	12 Laporan	11.333,900
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana			28.820.000

				Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
<b>TOTAL</b>							<b>10.506.920.831</b>

#### D. Rencana Anggaran Tahun 2021

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng di dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi didukung dengan APBD Kabupaten Buleleng. Rincian anggaran belanja dan sumber dana Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut :

**Tabel 2. 7 Anggaran Belanja Dinas**

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Buleleng Tahun 2021

No.	Belanja Daerah	Pagu (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (1)</b>	<b>5.716.271.000</b>	<b>5.712.832.935</b>
1.1	Belanja Pegawai	5.716.271.000	5.712.832.935
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung (2)</b>	<b>5.108.259.296</b>	<b>4.794.187.896</b>
2.1	Belanja Barang Dan Jasa	4.863.659.296	4.516.287.896
2.2	Belanja Hibah	205.000.000	205.000.000
2.3	Belanja Modal	39.600.000	72.800.000
<b>Total Pagu (1+2)</b>		<b>10.824.530.296</b>	<b>10.506.920.831</b>

**Tabel 2. 8 Sumber Dana Belanja Langsung**  
 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Kabupaten Buleleng Tahun 2020 s/d 2021

**1) Tahun 2020**

No.	Sumber Dana	Pagu (Rp.)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	DBH PPH	362.000.000	475.000.000
2	BHP Prov BBKB	168.411.200	300.000.000
3	DAU	2.517.997.000	1.210.503.142
4	DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000	417.358.000
5	DAK Penugasan Bid. Pasar	3.325.446.000	-
6	BKK Badung	150.000.000	-
7	PAD	1.350.000.000	1.200.000.000
8	SILPA	100.000.000	500.000
<b>Total</b>		<b>8.391.212.200</b>	<b>3.603.361.142</b>

**2) Tahun 2021**

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	DAU	6.837.310.494	3.396.073.000
2	DAU DTU 25%	-	743.417.320
3	PAD	2.431.236.000	2.406.079.935
4	BHP PROV BBNKB	1.137.167.902	1.136.703.052
5	DID	-	865.110.480
6	SILPA DID REGULER	-	1.220.788.752
7	SILPA DID TAMBAHAN	-	319.932.392
8	DAK	390.304.000	390.304.000
9	SILPA DAK NON FISIK	28.511.900	28.511.900
<b>Total</b>		<b>10.824.530.296</b>	<b>10.506.920.831</b>

**Tabel 2. 9 Alokasi Anggaran Belanja Langsung**

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.864.830
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	310.900.622

			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	107.078.425
			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	67.804.324
2	Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,</b>	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	206.724.200

			<b>USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	88.476.945
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro					57.221.980	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					227.506.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					208.110.025	
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	57.521.100
3	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN</b>	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	150.467.580

			<b>PERUSAHAAN</b>			
		Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	676.651.880
			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	45.639.050
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	86.611.280
			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	272.101.355

		Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	215.158.790
					Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	82.526.000
4	Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	161.426.560
5	Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	148.193.370
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	211.219.300

			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.694.576
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.715.832.935
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.815.826
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.800.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.022.200
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.387.500
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.624.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.128.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.037.897
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.360.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan	239.223.334

				Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.067.365
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.333,900
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.820.000
<b>TOTAL</b>					<b>10.506.920.831</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang dibuat sesuai ketentuan yang Buleleng diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, seluruh jajaran Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

## A. KERANGKA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Penilaiannya mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Predikat penilaian capaian kinerja sasaran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

<b>85% s/d 100%</b>	<b>:</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b>70% s/d 84%</b>	<b>:</b>	<b>Berhasil</b>
<b>55% s/d 69%</b>	<b>:</b>	<b>Cukup Berhasil</b>
<b>&lt;55%</b>	<b>:</b>	<b>Tidak Berhasil</b>

## B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini berdasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut ini :

**Tabel 3. 1 Pencapaian Sasaran Strategis**  
 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Kabupaten Buleleng Tahun 2021

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Jumlah Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Rata-rata Capaian (%)</b>	<b>Predikat</b>
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	81 Pasar	Sangat Berhasil
		Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	55%	Sangat Berhasil
		Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	81%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	80%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	76,79%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	77,5%	Sangat Berhasil
5	Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	26%	Sangat Berhasil
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	1,3%	Sangat Berhasil

## **1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021**

Berdasarkan uraian Visi, Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memiliki 1 Tujuan, 5 Sasaran Strategis, dan 8 Indikator Sasaran Strategis. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2021 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1.1 Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas”**

Pada Sasaran Strategis pertama memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yang telah terukur dengan rumus atau formula tertentu. Tingkat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1 akan diuraikan, sebagai berikut :

**Tabel 3. 2 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	81 Pasar	81 Pasar	100%
		Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	55%	55%	100%
		Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	81%	81%	100%

**Tabel 3. 3 Program Pendukung Capaian Kinerja pada Sasaran Strartegis 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>150.467.580</b>	<b>149.752.176</b>	<b>99,52%</b>
		Persentase PKL Tata Kelola Sesuai Aturan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	48 Unit Usaha	48 Unit Usaha	100%	150.467.580	149.752.176	99,52%
			- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	48 Unit Usaha	48 Unit Usaha	100%	150.467.580	149.752.176	99,52%
			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>81 Pasar</b>	<b>81 Pasar</b>	<b>100%</b>	<b>676.651.880</b>	<b>663.346.250</b>	<b>98,03%</b>
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana	49 Pasar	49 Pasar	100%	676.651.880	663.346.250	98,03%	

			Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						
			- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	100%	676.651.880	663.346.250	98,03%
			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>132.250.330</b>	<b>127.314.648</b>	<b>96,27%</b>
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	14 sub distributor	14 sub distributor	100%	45.639.050	44.279.332	97,02%
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14 sub distributor	14 sub distributor	100%	45.639.050	44.279.332	97,02%
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%	86.611.280	83.035.316	95,87%
			- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	100%	86.611.280	83.035.316	95,87%
			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM</b>	<b>10 Produk Unggulan/</b>	<b>10 Produk Unggulan/</b>	<b>100%</b>	<b>272.101.355</b>	<b>267.042.698</b>	<b>98,14 %</b>

			<b>NEGERI</b>	<b>4 Promosi</b>	<b>4 Promosi</b>				
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10 Produk Unggulan/ 4 Promosi	10 Produk Unggulan/ 4 Promosi	100%	272.101.355	267.042.698	98,14 %
			- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 Produk Unggulan/ 4 Promosi	10 Produk Unggulan/ 4 Promosi	100%	272.101.355	267.042.698	98,14 %
		Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>	<b>297.684.790</b>	<b>291.967.078</b>	<b>98,08%</b>
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	100%	100%	297.684.790	291.967.078	98,08%
			- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	8000 UTTP	8000 UTTP	100%	215.158.790	211.119.750	98,12%
			- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	30 BDKT/ 500UTTP	30 BDKT/ 500UTTP	100%	82.626.000	80.847.328	97,97%
<b>TOTAL</b>							<b>1.529.155.935</b>	<b>1.499.421850</b>	<b>98,05%</b>

### 1.1.1 Analisis Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas”

Strategi untuk dapat mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas” adalah dengan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng. Program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2021 untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas”, antara lain:

#### 1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Program ini didukung dengan total anggaran Rp 150.467.580 dengan realisasi Rp 149.752.176 atau 99,52% dan realisasi fisik 100 %. Program ini terlaksana melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

##### ➤ Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 150.467.580 dengan realisasi Rp 149.752.176 atau 99,52% dan realisasi fisik 100 %. Pelaksanaan kegiatan ini di dukung oleh 1 sub kegiatan yaitu **(1) Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang** anggaran sebesar Rp 150.467.580 dengan realisasi Rp 149.752.176 atau 99,52% dan realisasi fisik 100 %. Adapun kegiatan yang mendukung keberhasilan program/kegiatan/sub kegiatan yaitu :

##### 🚩 Pembinaan Tim Tertib Niaga Hari-Hari Besar Keagamaan

1. Hari Raya Nyepi Caka 1943 Tim melakukan Pembinaan pada tanggal 5 Maret 2021 ke Pasar Tradisional dan Toko Modern antara lain :
  - a) Pasar Banyuasri
  - b) Supermarket Artha Sedana Seririt
  - c) Pepito desa Kaliasem Kecamatan Banjar
  - d) Alfamart Galiran
2. Hari Raya Idul Fitri Tim melakukan Pembinaan tanggal 7 Mei 2021 ke Toko Moderen dan Mini Market antara lain :
  - a) Toko Cahaya Baru Kecamatan Buleleng
  - b) KSA (Toserba) desa Sangsit Kecamatan Sawan
  - c) Toko Grosiran Harapan Anda
  - d) Clandy"s Kecamatan Buleleng
  - e) Mini market ABD Singaraja
3. Hari Raya Galungan Tim melakukan Pembinaan tanggal 8 Nopember 2021 ke Toko Modern dan Mini Market antara lain :
  - a) Clandy"s Kecamatan Seririt
  - b) KSA Toserba Sangsit Kecamatan Sawan

- c) Alfa maret Sulanyah Kec.Seririt
  - d) Supermarket Artha Sedana Buleleng
4. Hari Raya Natal Tim melakukan pembinaan tanggal 22 Desember 2021 ke Toko Modern dan Mini Market antara lain :
- a) Toko Cahaya Baru Kecamatan Buleleng
  - b) Toko Aneka Plastik Kerobokan Kec.Sawan
  - c) Toserba Kembang Sari Arta Desa Sangsit Kec.Sawan
  - d) Indomart desa Sangsit Kec.Sawan
  - e) Mini Market Oriana Banjar Pasek Desa Kubutambahan
  - f) M.M. Sari Ganesa Banjar Pasek Desa Kubutambahan
  - g) Alfa Mart Banjar Tegal Desa Kubutambahan

**📌 Penerbitan Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)**

No	Nama Perusahaan & Alamat Perusahaan	No.Tgl Rekomendasi	Barang/Produk yang disimpan
1	<b>PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI</b> Br.Dinas Bingin Banjah,Ds. Temukus Kec.Banjar	800/78/1/II/2021 <b>Tgl. 1 Februari 2021</b>	GAS LPG 3 Kg
2	<b>PT.LARIS MANIS UTAMA</b> Jl. Surapati No.170,Kel. Banyuning Utara Kec.Buleleng	800/79/1/II/2021 <b>Tgl. 1 Februari 2021</b>	Perdagangan Besar Buah-Buahan
3	<b>PT.BAGAS PUTRA SARI</b> Jl. Surapati No. 136,Kel. Banyuning, Kec.Buleleng	800/128/II/2021 <b>Tgl. 16 Februari 2021</b>	GAS LPG 3 Kg
4	<b>GUDANG WIRASANJAYA</b> Br.Dinas Celuk Buluh,Ds.Kalibukbuk Kec.buleleng	800/182/III/2021 <b>Tgl. 10 Maret 2021</b>	Makanan dan Minuman Alat-Alat Tehnik Botol Minuman Kosong
5	<b>PT INDAH PERMAI</b> Jl. Surapati No.86,Kel. Banyuning Utara Kec.buleleng	800/218/23/III/2021 <b>Tgl. 23 Maret 2021</b>	Air Mineral (Aqua)
6	<b>PT.AYU SARI GASINDO</b> Jl. Singaraja- Seririt No. 54X, Kec.Banjar	800/229/26/III/2021 <b>Tgl. 26 Maret 2021</b>	Tabung Gas LPG
7	<b>PT.UD SAMA JAYA MOTOR</b> Jl.A.Yani No. 196,Kel. Banyuasri, Kec.Buleleng	800/238/29/III/2021 <b>Tgl. 29 Maret 2021</b>	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (Ban,Minyak Pelumas)
8	<b>PT. SETIA TANI</b> Jl. Ir.Soekarno By Pass Kediri Tabanan	800/259/6/iv/2021 <b>Tgl. 6 April 2021</b>	Rekomendasi pupuk bersubsidi
9	PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PPI) Jl.Hayam Wuruk No.117 Denpasar	800/366/05/V/2021 <b>Tgl. 5 Mei 2021</b>	Rekomendasi pupuk bersubsidi
10	<b>CV. TRIBERT</b> Jl. Nusa Indah No.143,Kel.Kaliuntu, Kec.Buleleng	800/238/29/V/2021 <b>Tgl. 4 Mei 2021</b>	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (Sparepart Mobil)

11	<b>PT SAKA AGUNG ABADI</b> Br.Dinas Munduk Sari,Desa Pengulon, Kec.Gerokgak	800/238/29/V/2021 <b>Tgl. 31 Mei 2021</b>	Perdagangan Besar ( Semen,Kapur,Kayu )
12	<b>PT.SURYA KINTAMANI</b> Bd. Bingin Banjar. Ds.Temukus,Kec.Banjar	800/687/19/VIII/2021 <b>Tgl. 19 Agustus 2021</b>	Perdagangan Makanan dan minuman ringan,roti kering, kopi waith,milk kuat,air mineral VIT
13	<b>TOKO NIAN DAMAI</b> Br.Dinas Dauh Munduk,Ds.Bungkulan	800/686/19/VIII/2021 <b>Tgl. 19 Agustus 2021</b>	Makmin Ringan,BIR,Anggur Cap Orang Tua
14	CV PERTIWI TANI Jl. Pipitan Sari No.25,Bjr.Kayutulang Canggu Kuta Utara,Kab.Badung	800/786/19/X/2021 <b>Tgl. 5 Oktober 2021</b>	Rekomendasi pupuk bersubsidi
15	PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (PPI) Jl.Hayam Wuruk No.117 Denpasar	800/785/IX/2021 <b>Tgl. 30 September 2021</b>	Rekomendasi pupuk bersubsidi
16	<b>PT. INDAH PERMAI</b> Jl.Sudirman No. 187 Seririt,Kec.Seririt	800/1088/16/XII/2021 <b>Tgl. 16 Desember 2021</b>	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol bukan Susu,Air Minum dalam kemasan (Aqua)

**🚩 Menindak Lanjuti Temuan Loka POM Kabupaten Buleleng terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa dan Produk Kosmetik yang Tanpa Ijin Edar (TIE)**

- Menindaklanjuti temuan Loka POM Obat dan Makan Produk Kadaluwarsadan Kemasan Rusak tanggal, 15 Januari 2021 di Kecamatan Buleleng yaitu :
  - Carefour Singaraja Jl.Surapati No. 121 Singaraja
  - PT.Arta Sedana Jl. Ngurah Rai No. 50 Singaraja
  - Toko Harapan Anda Jl. Hasanudin No. 38 Singaraja
- Menindaklanjuti temuan Loka POM Obat dan Makan Produk Kadaluwarsadan Kemasan Rusak,TIE dan Kebersihan Gudang tanggal, 29 Januari 2021 di Kecamatan Buleleng yaitu :
  - Carefour Singaraja Jl.Surapati No. 121 Singara
  - Pepito Swalayan.Jl.Seririt Singaraja Ds.Kaliasem
  - Tirta Dewata Jl. A. Yani 192 A Singaraja
  - PT GIEB Indonesia Jl. Raya Singaraja-Seririt Ds.Kalibukbuk
- Menindaklanjuti temuan Loka POM Obat dan Makan Produk Kadaluwarsa tanggal, 7 April 2021 di Kecamatan Tejakula yaitu :
  - Toko RAT Mart Jl. Singaraja-Amlapura
  - Toko Airlangga Grosir Jl. Raya Bondalem- Tejakula

4. Menindaklanjuti temuan Loka POM Obat dan Makan Produk Kadaluwarsa ,Kosmetik TIE, Penyimpanan Tanpa Palet tanggal, 18 Mei 2021 di Kecamatan Buleleng dan Seririt yaitu :
  - Toko Putri Sinta Cosmetic Seririt Jl. Gajah Mada No. 50 Seririt
  - Toko AR. Jl. Letjen R Soprapto No.25 Seririt
  - UD Mafe Jl. A Yani no.108 B Kaliuntu
  - PT.Arta Sedana Jl. Ngurah Rai No. 50 Singaraja
  - Toko Putri Sinta,Jl.Diponegoro No.79 Singaraja,Kel.Kampung Kajanan
  - Toko Cahaya Baru 2. Jl. Serma Karma Singaraja
5. Menindaklanjuti temuan Loka POM Obat dan Makan Produk Kadaluwarsa tanggal, 19 Mei 2021 di Kecamatan Buleleng yaitu :
  - PT Bintang Bali Indah Jl. Serma Karma No. 88 Baktiseraga
6. Menindaklanjuti temuan Loka POM Kebersihan Gudang dan Makan Produk Kadaluwarsa,Kemasan Rusak,TIE dan Parsel dicampur produk non pangan dan pangan dtanggal, 14 Juni 2021 di Kecamatan Buleleng yaitu :
  - Toko Muliadi Jl. Setiabudi Banyuning
  - Toko Alfa Mart Galiran Jl. A.Yani Buleleng
  - Toko Arab “Ochen” dalam Pasar Anyar,Jl. Diponegoro
  - Toko Cahaya Baru Jl. WR.Supratman 149 Singaraja
  - Ud. Harapan Anda Jl. Singaraja-Lovina Desa Tukadmungga
  - ADD Foodmart Jl.Udayana No.2 A Singaraja
  - Arta Sedana Jl. Ngurah Rai No. 50 SingarajaPT. Graha Artha Persada Jl. Ayani Barat No. 209 Singaraja
7. Menindaklanjuti temuan Loka POM Obat dan Makan Produk Kadaluwarsa ,,Tidak Memilik Perizinan Berusaha dan TIE serta Obat Keras tanggal, 29 Juni 2021 di Kecamatan Buleleng, Seririt dan Sawan yaitu :
  - Toko Mang Arya Jl. Sudirman No. 54 Seririt
  - KSA (Kembang Sari Arta) Jl.Raya Sangsit No. 2 Singaraja
  - Kripik Tempe Cinta Jl. Jatayu No. 19 Kaliuntu
  - UD Hawaii Bali Singaraja Jl. Pulau Jawa Penarukan
  - Toko Lianta Jaya Jl. Patimura No. 15 Singaraja

8. Menindaklanjuti temuan Loka POM Obat dan Makan Produk Kosmetika,,Tidak Memilik Perizinan Berusaha dan TIE tanggal, 4 Oktober 2021 di Kecamatan Tejakula yaitu :
  - Toko Yulia Busana Jl. Singaraja-Amlapura
  - Honesta Desa Les
9. Menindaklanjuti temuan Loka POM Obat dan Makan Produk Kosmetika,,Tidak Memilik standar Keamanan ,Produk Kosmetika TIE produk pangan Kadaluwarsa tanggal, 10 Desember 2021 di Kecamatan Seririt,Banjar dan Buleleng yaitu :
  - Toko Rusmini Jl.Diponogoro No. 58 Seririt
  - Berlian Kosmetik Jl.Seririt Kalibukbuk
  - Toko Bukit Sari Jl.Sudirman Sulanyah
  - Yasa Tirta Grosir Jl. Ida Made Rai Ds.Banjar
  - Toko Mantari Dusun Labuan Aji Ds.Temukus
10. Menindaklanjuti temuan Loka POM Obat dan Makan Produk Kosmetika,,Tidak Memilik standar Keamanan ,Produk Kosmetika TIE produk pangan Kadaluwarsa dan Kondisi Gudang tanggal, 17 Desember 2021 di Kecamatan Banjar ,Kubutambahan,Sawan, Sukasada dan Buleleng yaitu :
  - Usadha Santika Bali Jl. Singaraja-Gilimanuk Ds.Kaliasem
  - Toko Panji Raya Jl.Kibarak Panji Ds.Panji
  - SRC Melati Jl. Srikandi No.38 Singaraja
  - PT.Anugrah Ds,Pemaron
  - Yeppa Kubutambahan Jl.Raya Air Sanih
  - Toko Oriana M.M Jl. Raya Air Sanih Bd.Pasek Kubutambahan
  - Queen Beauty Kosmetik Jl. Jelantik Gingsir Sangket
  - Penjual Kosmetik Online Jl.Bakung RT.001 Ds.Sukasada

## **2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

Program ini didukung dengan total anggaran Rp 676.651.880 dengan realisasi Rp 663.346.250 atau 98,03% dan realiasasi fisik 100%. Program ini terlaksana melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

- **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.** Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp 676.651.880 dengan realisasi Rp 663.346.250 atau 98,03% dan realiasasi fisik 100%. Kegiatan ini dapat tercapai karena di dukung 1 sub kegiatan yaitu (1)

**Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan** dengan anggaran Rp 676.651.880 dengan realisasi Rp 663.346.250 atau 98,03% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan dan sub kegiatan ini dapat tercapai dengan melaksanakan kegiatan pembinaan kepada pengelola dan pedagang pasar, pembinaan PKL yang tersebar di 9 Kecamatan Buleleng.

### **3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

Program ini didukung dengan total anggaran Rp 132.250.330 dengan realisasi Rp 127.314.648 atau realisasi 96,27% dan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bertujuan untuk menjaga kestabilan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen/pegepul. Program ini tercapai dengan dukungan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :

- **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp 45.639.050 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 44.279.332 atau 97,02% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dapat tercapai karena di dukung 1 sub kegiatan yaitu **(1) Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat** dengan anggaran Rp 45.639.050 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 44.279.332 atau 97,02% dan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan ini dilaksanakan dalam 12 bulan, yang terdiri dari kegiatan pendataan stok ketersediaan barang kebutuhan pokok di 14 agen di Kabupaten/Kota dan pemantauan stok kebutuhan pokok yang terdiri dari 20 komoditi di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 4 minggu dalam sebulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun 2021.
- **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp 86.611.280 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 83.035.316 atau 95,87% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dapat tercapai karena di dukung 1 sub kegiatan yaitu **(1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota** dengan anggaran Rp 86.611.280 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 83.035.316 atau 95,87% dan realisasi fisik 100%. Sub kegiatan ini dapat tercapai dengan melaksanakan pemantauan harga secara rutin

ke 2 pasar yang dijadikan sample pemantauan yaitu Pasar Anyar dan pasar Banyuasri. Sepanjang tahun 2021 harga kebutuhan pokok dan harga barang penting di kedua pasar tersebut relative stabil, namun tidak dipungkiri terdapat beberapa kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang meningkat maupun menurun yang disebabkan oleh factor cuaca yang menyebabkan pasokan menjadi terbatas/tidak stabil.



#### **4. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**

Program ini dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp 272.101.355 dengan realisasi Rp 267.042.698 atau 98,14% dan realisasi fisik 100%. Program ini terlaksana melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

- **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri** total anggaran sebesar Rp 272.101.355 dengan realisasi Rp 267.042.698 atau 98,14% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dapat tercapai karena di dukung 1 sub kegiatan yaitu **(1) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar

Rp 272.101.355 dengan realisasi Rp 267.042.698 atau 98,14% dan realisasi fisik 100%. Maksud dari pelaksanaan kegiatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah memperkenalkan produk dalam negeri yang berkualitas kepada masyarakat serta memfasilitasi akses pemasaran melalui kemitraan dengan ritel modern dan marketplace memakai/menggunakan produk Indonesia (lokal Bali). Sedangkan tujuan/sasaran diselenggarakannya kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah ;

- 1) Menciptakan minat dan keinginan masyarakat untuk memakai produk Indonesia (lokal Bali).
- 2) Terbangunnya kesadaran dan minat untuk menggunakan produk dalam negeri (lokal Bali).
- 3) Membuka serta menyediakan akses bagi masyarakat atas produk dalam negeri.

Adapun pelaksanaan kegiatan kegiatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Pameran Produk unggulan IKM/UKM dilaksanakan pada tanggal 30 Maret s.d 5 April 2021 dalam rangka peresmian pembukaan Pasar Banyuasri yang dirangkaiakan dengan Pameran produk UKM yang bertempat di Gedung Lt.1 Pasar Banyuasri. Peserta yang mengikuti pameran berjumlah 40 IKM/UKM dengan produk olahan pangan dan produk kerajinan.
- 2) Mengikuti Pameran Dekranasda Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari s.d 14 Maret 2021 di Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai Bali dalam rangka mempromosikan dan memasarkan produk kerajinan dan UMKM Bali dengan Peserta yang mengikuti pameran berjumlah 3 IKM/UKM yaitu dengan pameran produk kerajinan.
- 3) Mengikuti Pameran Produk Unggulan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni s.d 10 Juli 2021 di Art center Denpasar dalam rangka Pesta Kesenian

Bali (PKB) XLIII tahun 2021 dengan peserta yang mengikuti pameran berjumlah 7 IKM/UKM yaitu dengan pameran produk pangan olahan dan kerajinan.

- 4) Melaksanakan Pameran Produk Unggulan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember s.d 4 Nopember 2021 di Hotel Puri Saron dalam rangka “*Gebyar Kuliner Buleleng*“, dirangkaikan dengan pameran produk unggulan dengan peserta yang mengikuti pameran berjumlah 40 IKM/UKM yaitu dengan pameran produk olahan pangan dan produk kerajinan.
- 5) Melaksanakan Pameran Produk Unggulan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember s.d 25 Nopember 2021 di Hotel Sunari dalam rangka Pertemuan BPR se-Bali dengan pameran produk unggulan dengan peserta yang mengikuti pameran berjumlah 35 IKM/UKM yaitu dengan pameran produk olahan pangan dan produk kerajinan.
- 6) Mengikuti Pameran Produk Unggulan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember s.d 26 Nopember 2021 di Hotel Kuta Bali dalam rangka Temu Bisnis Unisco dengan pameran produk unggulan dengan peserta yang mengikuti pameran berjumlah 5 IKM/UKM yaitu dengan pameran produk pangan olahan dan produk kerajinan.
- 7) Mengikuti Pameran Obat Tradisional yang dilaksanakan pada hari Rabu 24 Nopember 2021 s.d Jumat 26 Nopember 2021 bertempat di Kabupaten Jembrana (Parkir Timur Kantor Bupati Jembrana) dengan peserta yang mengikuti pameran berjumlah 5 IKM/UKM yaitu dengan pameran produk obat tradisional.

## **5. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Program ini bertujuan untuk memberdayakan lembaga perlindungan konsumen dalam rangka pengawasan terhadap barang beredar dan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya). Sasaran program ini adalah meningkatnya pengamanan dan perlindungan konsumen yang sesuai dengan aturan.

Program ini di dukung dengan total anggaran sebesar Rp 297.684.790 dengan realisasi sebesar Rp 291.967.078 atau 98,08% dan realisasi fisik 100%. Program ini dapat tercapai karena didukung oleh 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :

➤ **Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 297.684.790 dengan realisasi sebesar Rp 291.967.078 atau 98,08% dan realisasi fisik 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung tercapainya keberhasilan kegiatan ini yaitu :

**(1) Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang** dengan anggaran sebesar Rp 215.158.790 realisasi Rp 211.119.750 atau 98,12% dan realisasi fisik 100%. Pelayanan tera dan tera ulang di Kabupaten Buleleng merupakan suatu kegiatan pelayanan kepada pelaku usaha dan perseorangan yang bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian dan standarisasi alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya) dalam rangka melindungi kepentingan umum dan perlindungan konsumen, dalam hal kebenaran pengujian, pengukuran, penakaran, penimbangan dan kalibrasi untuk menentukan ukuran yang paling pas atau yang sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang ini dilaksanakan di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng. Namun akibat adanya pemberlakuan PPKM pandemic covid-19 pada bulan Agustus s/d Oktober tahun 2021 dan rasionalisasi anggaran ini, pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Berikut data pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun 2021 :

📊 Data Pompa Ukur BBM di SPBU Kabupaten Buleleng Tahun 2021

No	Nama SPBU	Alamat SPBU	Jumlah UTTP/PUBBM yang ditera ulang (unit)
1	54.811.01	Desa Anturan	16
2	54.811.02	Kel. Banyuasri	14
3	54.811.03	Kel. Penarukan	4
4	54.811.04	Kel. Sukasada	9
5	54.811.05	Ds. Lokapaksa	12
6	54.811.06	Ds. Bondalem	6
7	54.811.07	Ds. Celukan Bawang	8
8	54.811.08	Ds. Kubutambahan	7
9	54.811.09	Ds. Dencarik	15
10	54.811.10	Ds. Giri Mas	10
11	54.811.11	Ds. Bubunan	7
12	54.811.12	Ds. Pemuteran	6
13	54.811.13	Ds. Musi	6

14	54.811.14	Jln. Gajah Mada	10
15	54.811.15	Jln. A. Yani	8
16	54.811.16	Kel. Seririt Kota	11
17	54.811.17	Ds. Baktiseraga	-
18	54.811.18	Ds. Tangguwisia	19
19	54.811.19	Ds. Banjarasem	6
<b>Jumlah</b>			<b>174</b>

 Data Pompa Ukur BBM di Pertashop Kabupaten Buleleng Tahun 2021

No	Nama Pertashop	Alamat Pertashop	Jumlah UTTP/PUBBM yang ditera ulang (unit)
1	5P.811.01	Ds. Bontihing	1
2	5P.811.02	Ds. Gobleg	1
3	5P.811.03	Ds. Banyuatis	1
4	5P.811.04	Ds. Sanggalangit	2
5	5P.811.05	Kel. Banyuning	1
6	5P.811.06	Ds. Alasangker	1
7	5P.811.07	Ds. Temukus (SPPBE)	1
8	5P.811.08	Ds. Temukus	1
9	5P.811.09	Ds. Wanagiri	1
10	5P.811.10	Ds. Tunjung	1
11	5P.811.11	Ds. Gerokgak	1
12	5P.811.12	Ds. Sumberklampok	1
13	5P.811.13	Ds. Jagaraga	1
14	5P.811.16	Ds. Air Sanih	1
<b>Jumlah</b>			<b>15</b>

 Data Sidang Tera Ulang Pasar/Desa Tahun 2021

No	Nama Pasar	Jumlah UTTP yang ditera ulang (unit)	Jumlah WTU (orang)
1	Pasar Goris/Pejarakan	359	67
2	Pasar Sumberkima	86	12
3	Pasar Banyupoh	253	46
4	Pasar Penyabangan	295	45
5	Pasar Gerokgak	352	57
6	Pasar Tinga-Tinga	125	22
7	Pasar Lokapaksa	247	39
8	Pasar Banjarasem	337	39

9	Pasae Patemon	270	46
10	Pasar Seririt	893	153
11	Pasar Bongancina	181	23
12	Pasar Umejero	87	12
13	Pasar Busungbiu	159	156
14	Pasar Pancasari	283	65
15	Pasar Sukasada	161	26
16	Pasar Penuktukan	282	47
17	Desa Les	176	29
18	Desa Tejakula	182	30
19	Desa Bondalem	211	40
20	Desa Sembiran	135	17
21	Desa Tajun	157	25
22	Pasar Tamblang	236	34
23	Desa Pakisan	228	33
24	Desa Kubutambahan	381	70
25	Pasar Banjar	619	96
26	Desa Dencarik	141	25
27	Desa Temukus	170	25
28	Pasar Kalibukbuk	254	42
29	Pasar Banyuasri	456	74
30	Desa Sawan	117	21
31	Desa Jagaraga	158	18
32	Desa Bungkulan	207	36
33	Desa Sangsit	266	46
34	Desa Sudaji	169	27
35	Pasar Kp Bugis	121	20
36	Pasar Kp Tinggi	198	33
37	Pasar Buleleng	170	27
38	Pasar Penarukan	102	17
39	Pasar Anyar	828	155
40	Pasar Anturan	70	14
41	Pasar Pamaron	23	21
<b>Jumlah</b>		<b>10.145</b>	<b>1.830</b>

 Data Pelayanan di Perusahaan Tempat UTTP Terpasang Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jumlah UTTP (Unit)
1	PT. Semen Indonesia	Jl. Pelabuhan Celukanbawang	2
2	PT. Carisma Sentra Persada	Jl. Pelabuhan Celukanbawang	4
3	PT. Dhis Manunggal Karya	Jl. Pelabuhan Celukanbawang	1
4	PT. General Energy Indonesia	Ds. Celukanbawang	1
5	PT. Palguna Jaya	Ds.Musi	4
6	PT. Sea Six Indonesia	Ds.Patas	2
7	PT. Ayu Sari Pertiwi (SPPBE)	Ds. Temukus	18
8	PT. Sinarbali Binakarya	Bendungan Sawan	6

9	PT. Sari Sentana Arka	Ds.Sawan	8
10	Pepito Market	Lovina	4
11	RSU Parama Sidhi	Jl. Ayani Singaraja	41
12	PT. Arta Sedana	Jl. Ngurah Rai Singaraja	5
13	PT. Gaya Investama (SPPBE)	Ds. Bila Kubutambahan	21
14	PT. Sinarbali Binakarya	Ds. Gitgit Short Cut Titik 5.6	3
<b>Jumlah</b>			<b>120</b>

(2) **Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal** dengan anggaran sebesar Rp. 82.526.000 realisasi Rp 80.847.328 atau 97,97% dan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan dan penggunaan UTTP serta kesesuaian pelabelan produk BDKT melalui pengawasan UTTP dan BDKT secara konsekuen dan berkelanjutan yang memenuhi standar, antara lain adanya penerapan label yang benar, cara menjual yang tidak merugikan konsumen, serta adanya fasilitasi purna jual yang sesuai dengan yang diiklankan. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu :

- Meningkatkan kesesuaian pelabelan produk BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) berupa produk makanan dan minuman dengan jenis – jenis komoditi:
  1. Produk makanan kaleng
  2. Produk minyak makanan nabati dan hewani
  3. Produk margarin dan minyak goreng
  4. Produk tepung terigu, roti dan gula
  5. Produk bumbu masakan/ penyedap makanan
  6. Produk buah / sayuran kaleng
  7. Produk minuman ringan dan sejenisnya
- Meningkatkan tertib ukur terhadap pengguna/pemilik alat UTTP (Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya) yaitu:
  1. Timbangan Sentisimal(CB)
  2. Timbangan Meja (TM)
  3. Dacin Logam (DL)
  4. Timbangan Bobot Ingsut (TBI)
  5. Timbangan Pegas (TP)
  6. Timbangan Kwadran
  7. Timbangan Cepat
  8. Neraca Emas
  9. Neraca Obat

10. Neraca Biasa

11. Timbangan Elektronik (TE)

12. Pompa Ukur BBM (PU BBM)

Realisasi kegiatan ini yaitu terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan dan penggunaan UTTP serta produk BDKT.



### **1.1.2 Faktor Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja pada Sasaran “Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas”**

Adapun faktor keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada tahun 2021, sebagai berikut :

1. Pembinaan Tertib Niaga pada Hari-hari besar keagamaan terhadap toko modern, pasar tradisional dan mini market yang tersebar di 9 Kecamatan Buleleng.
2. Menerbitkan rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG).
3. Menindaklanjuti Temuan Loka POM Kab. Buleleng terhadap produk pangan kadaluwarsa dan produk kosmetik Tanpa Ijin Edar (TIE).

4. Pembinaan kepada PKL, pengelola dan pedagang pasar.
5. Terlaksananya pendataan terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok di 14 agen di Kabupaten/Kota dan pemantauan stok kebutuhan pokok yang terdiri di 20 komoditi.
6. Terlaksananya pemantauan harga di 2 pasar, yaitu Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri
7. Pelaksanaan pameran produk unggulan daerah.
8. Peningkatan monitoring dan pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) dan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya).
9. Optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Tera dan Tera Ulang di 9 Kecamatan.
10. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang berkaitan dengan UTTP serta peredaran barang dan jasa.

## 1.2 Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri”

Pada Sasaran Strategis kedua memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yang telah terukur dengan rumus atau formula tertentu. Tingkat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatkan Sektor Perindustrian yang Mandiri akan diuraikan, sebagai berikut :

**Tabel 3. 4 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Stragtegis 2 Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	80%	80%	100%

Tabel 3. 5 Program Pendukung Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	80%	80%	100%	161.426.560	159.926.768	99,07%
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	80%	80%	100%	161.426.560	159.926.768	99,07%
			- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30 IKM	30 IKM	100%	161.426.560	159.926.768	99,07%

### 1.2.1 Analisis Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri”

Sasaran strategis “Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri” ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM, yang dimana untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat dilaksanakan dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan atau tercapainya sasaran tersebut diatas. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dan indikator sasaran tersebut, antara lain :

#### 1. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 161.426.560 realisasi sebesar Rp 159.926.768 atau 99,07% dan fisik 100%. Program ini terlaksana melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

- **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 161.426.560 realisasi sebesar Rp 159.926.768 atau 99,07% dan fisik 100%. Kegiatan ini di dukung dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu, **(1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik** dengan anggaran sebesar Rp 161.426.560 realisasi sebesar Rp 159.926.768 atau 99,07% dan fisik 100%. Adapun pelaksanaan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- **Kegiatan sesuai Program**

Tanggal	Kegiatan
26 Agustus 2021	Koordinasi dan Konsultasi Akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kabupaten Buleleng. Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Jl. Raya Puputan Komplek Nitimandala Renon Denpasar.
9 September 2021	Koordinasi dan Konsultasi Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Buleleng. Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Jl. Raya Puputan Komplek Nitimandala Renon Denpasar.

Periode Tahun 2021	Fasilitasi Pencarian Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kabupaten Buleleng.
	Pengawasan Izin Perluasan Usaha Industri

• **Kegiatan Non Program**

Periode Tahun 2021	Tim UKL-UPL Kabupaten Buleleng, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
	Tim Revorma Agraria Kabupaten Buleleng, Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
	Tim Perijinan Kabupaten Buleleng. Dari Dinas Penanaman Modan Dan PTSP Kabupaten Buleleng
24 s/d 28 September 2021	Fasilitasi Pelatihan Pengolahan Buah Kelapa, di Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak. Yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag Prov. Bali
2 Oktober 2021 dan 5 Oktober 2021	Fasilitasi Audit Produksi Peserta Fasilitasi Izin Halal. Yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag Prov. Bali.
25 s/d 29 Nopember 2021	Pelatihan Bimtek Diversifikasi dan Peningkatan Kualitas Kerajinan Gerabah dan Keramik yang diadakan di Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng. Yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag Prov. Bali.

**1.2.2 Faktor Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja pada Sasaran 2  
“Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri”**

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Tahun 2021 di dukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Terlaksananya fasilitasi permohonan ijin usaha industry
2. Terlaksananya pengendalian izin usaha industry di Kabupaten Buleleng
3. Terintegrasinya IKM pada SIINas

### 1.3 Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah”

Pada Sasaran Strategis ketiga ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yang telah terukur dengan rumus atau formula tertentu. Tingkat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatkan Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah akan diuraikan, sebagai berikut :

**Tabel 3. 6 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 3 Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	76,79%	76,79%	100%

**Tabel 3. 7 Program Pendukung Capaian Kinerja pada Sasaran 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>76,79%</b>	<b>76,79%</b>	<b>100%</b>	<b>359.412.670</b>	<b>350.017.520</b>	<b>97,39%</b>
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	359.412.670	350.017.520	97,39%
			- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Sentra/1 laporan	5 Sentra/1 laporan	100%	148.193.370	139.399.028	94,07%
			- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 IKM	5 IKM	100%	211.219.300	210.618.500	99,72%

### 1.3.1 Analisis Sasaran Stragtegis 3 : “Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah”

Sasaran strategis “Meningkatnya Industri Berbasis Unggulan Daerah” ini didukung oleh 1 (satu) indicator sasaran yaitu Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB, yang dimana untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat dilaksanakan dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan atau tercapainya sasaran tersebut diatas. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dan indicator sasaran tersebut, antara lain :

#### 1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 359.412.670 realisasi sebesar Rp 350.017.520 atau 97,39% dan fisik 100%. Program ini terlaksana melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, yaitu :

- ▣ **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 348.468.032 realisasi sebesar Rp 350.017.520 atau 97,39% dan fisik 100%, dimana kegiatan ini di dukung oleh 2 sub kegiatan, yaitu : **(1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri** dengan anggaran sebesar Rp 148.193.370 realisasi anggaran sebesar Rp 139.399.028 atau 94,07% dan fisik 100%. Adapun pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut :

Tanggal	Kegiatan
19 Januari 2021	Menghadiri Undangan Rapat Menindaklanjuti Permohonan Data HAKI, di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
26 Januari 2021	Menghadiri Undangan Rapat Menindaklanjuti Permohonan MOU, di Ruang Kepala Balai Diklat Industri Denpasar
18 & 19 Pebruari 2021	Sosialisasi dan Kurasi Program Pelatihan Dan Pendampingan IKM/UKM Buleleng Naik Kelas Menuju Tahap Siap Ekspor
25 Pebruari 2021	Modul 1 Metodologi Manajemen Usaha Program Pelatihan Dan Pendampingan IKM/UKM Buleleng Naik Kelas Menuju Tahap Siap Ekspor

26 Pebruari 2021	Coaching Dan Visiting Ke Tempat Usaha IKM/UKM Program Pelatihan Dan Pendampingan IKM/UKM Buleleng Naik Kelas Menuju Tahap Siap Ekspor
9 & 10 Maret 2021	Coaching Dan Visiting Ke Tempat Usaha IKM/UKM
18 Maret 2021	Modul 2 Product Development (Kreatifitas dan Inovasi Product) Program Pelatihan Dan Pendampingan IKM/UKM Buleleng Naik Kelas Menuju Tahap Siap Ekspor
19 Maret 2021	Coaching Dan Visiting Ke Tempat Usaha IKM/UKM Program Pelatihan Dan Pendampingan IKM/UKM Buleleng Naik Kelas Menuju Tahap Siap Ekspor
24 Maret 2021	Sosialisasi Perijinan Program Pelatihan Dan Pendampingan IKM/UKM Olahan Pangan Buleleng Naik Kelas Menuju Tahap Siap Ekspor
7 April 2021	Modul Digital Marketing Program Pelatihan Dan Pendampingan IKM/UKM Olahan Pangan Buleleng Naik Kelas Menuju Tahap Siap Ekspor
29 April 2021	Modul 3 Peningkatan Akses Pemasaran (Branding Dan Segmentasi Pasar ) Program Pelatihan Dan Pendampingan IKM/UKM Buleleng Naik Kelas Menuju Tahap Siap Ekspor
30 April 2021	Acara Penutupan, Coaching Packaging, Branding & Digital Online Dan Presentasi Produk Development Hasil IKM/UKM Program Pelatihan Dan Pendampingan IKM/UKM Buleleng Naik Kelas Menuju Tahap Siap Ekspor
19 Mei 2021	Menghadiri Undangan Rapat Pengarahan dan Penyusunan Program Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian TA. 2022, di Ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Jl. Raya Puputan Komplek Nitimandala Renon Denpasar
10 Juni 2021	Modul Pengelolaan Keuangan Program Pelatihan Dan Pendampingan IKM/UKM Olahan Pangan Buleleng Naik Kelas Menuju Tahap Siap Ekspor
11 Juni 2021	Menghadiri Pelaksanaan Focus Group Discussion

	(FGD) Tentang Konsep Kawasan Industri MMEA Tradisional (KIMT) Untuk Mengendalikan Produksi dan Distribusi MMEA Tradisional Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Petani Arak Bali, di Aula Kecak, Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, Jalan Airport Ngurah Rai, Tuban, Denpasar
30 Agustus 2021	Pembuatan Video Promosi Kerajinan Unggulan Kabupaten Buleleng, Di Desa Petandakan, Desa Tigawasa dan Desa Kalianget.
3 September 2021	Pembuatan Video Promosi Kerajinan Unggulan Kabupaten Buleleng, Di Desa Sembiran, Desa Pacung dan Desa Les.
24 s/d 28 September 2021	Pendampingan Kegiatan Pelatihan Pengolahan Buah Kelapa, di Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak
29 September 2021	Menghadiri Undangan Pembahasan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Bandara Bali Baru di Amerta Bali Villas, Pemuteran dan Koordinasi Uji Coba Alat Penyulingan Arak Bali di Desa Gerokgak.

**(2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat** dengan anggaran sebesar Rp 211.219.300 realisasi anggaran Rp 210.618.500 atau 99,72% dan fisik 100%. Pemberian dana hibah kepada IKM, uraiannya sebagai berikut :

23 Agustus 2021	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, berupa hibah uang Hibah Kepada Kelompok Pengerajin Kayu Arta Wijaya, Desa Selat, Kecamatan Sukasada dalam rangka Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Pengerajin Kayu Arta Wijaya, Desa Selat, Kecamatan Sukasada. Senilai Rp. 30.000.000,-
	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, berupa hibah uang Hibah Kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Buleleng dalam rangka

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Buleleng. Senilai Rp. 50.000.000,-
	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, berupa hibah uang Hibah Kepada Kelompok Penjahit Onnys Wear, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan dalam rangka Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Penjahit Onnys Wear, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan. Senilai Rp. 25.000.000,
6 Oktober 2021	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, berupa hibah uang Hibah Kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Buleleng dalam rangka Pengadaan Sarana dan Prasarana Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Buleleng. Senilai Rp. 100.000.000,-

### **1.3.2 Faktor Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja pada Sasaran 3 “Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah”**

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2021 di dukung oleh beberapa factor, antara lain :

1. Sosialisasi dan Pendampingan terhadap IKM
2. Pemberian dan hibah kepada IKM

#### 1.4 Sasaran Strategis 4 : “Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas”

Pada Sasaran Strategis ke-4 ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yang telah terukur dengan rumus atau formula tertentu. Tingkat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas akan diuraikan, sebagai berikut :

**Tabel 3. 8 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 4 Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	77,5%	77,5%	100%

**Tabel 3. 9 Program Pendukung Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	77,5%	77,5%	100%	65.864.830	65.036.170	98,74%
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Koperasi	15 Koperasi	100%	65.864.830	65.036.170	98,74%
			- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Koperasi	15 Koperasi	100%	65.864.830	65.036.170	98,74%
			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN</b>	77,5%	77,5%	100%	222.569.682	214.357.722	96,31%

			<b>KOPERASI</b>						
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	65%	65%	100	222.569.682	214.357.722	96,31%
			- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Koperasi	30 Koperasi	100%	222.569.682	214.357.722	96,31%
			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>77,5%</b>	<b>77,5%</b>	<b>100%</b>	<b>67.804.324</b>	<b>65.068.198</b>	<b>95,96%</b>
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Koperasi	50 Koperasi	100%	67.804.324	65.068.198	95,96%
			- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	50 Koperasi	50 Koperasi	100%	67.804.324	65.068.198	95,96%

			Kabupaten/Kota						
			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>77,5%</b>	<b>77,5%</b>	<b>100%</b>	<b>310.900.622</b>	<b>272.310.726</b>	<b>87,59%</b>
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75%	75%	100%	310.900.622	272.310.726	87,59%
			- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	90 Orang	90 Orang	100%	310.900.622	272.310.726	87,59%
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>77,5%</b>	<b>77,5%</b>	<b>100%</b>	<b>107.078.425</b>	<b>98.804.532</b>	<b>92,27%</b>
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	75%	75%	100%	107.078.425	98.804.532	92,27%
			- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai	20 Koperasi	20 Koperasi	100%	107.078.425	98.804.532	92,27%

			Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
<b>TOTAL</b>							<b>774.217.883</b>	<b>715.577.348</b>	<b>92,42%</b>

#### 1.4.1 Analisis Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas”

Sasaran strategis “Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas” ini di dukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Presentase Koperasi Aktif dan Sehat. Koperasi dapat dikatakan aktif apabila setiap tahun mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan jumlah anggota tidak kurang dari 20 orang. Pada tahun 2021 jumlah total seluruh koperasi di Kecamatan Buleleng sebanyak 404 koperasi yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak 323 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 81 koperasi.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 ini menargetkan persentase koperasi aktif dan sehat sebesar 77,5% dengan realisasi sebesar 77,5% atau pencapaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung dengan 5 program, 5 kegiatan dan 5 sub kegiatan sebagaimana berikut :

- 1) **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**, Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 65.864.830 realisasi sebesar Rp 65.036.170 atau 98,74% dan realisasi fisik 100 %. Program ini dapat tercapai dengan melaksanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

📌 **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**, kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 65.864.830 realisasi sebesar Rp 65.036.170 atau 98,74% dan realisasi fisik 100 %. (1) **Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**, sub kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 65.864.830 realisasi sebesar Rp 65.036.170 atau 98,74% dan realisasi fisik 100 %.

- 2) **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**, Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 222.569.682 realisasi Rp 214.357.722 atau 96,31% dan fisik 100%

📌 **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**, sub kegiatan (1) **Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota**. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 222.569.682, realisasi Rp 214.357.722 atau 96,31% dan fisik 100%. Ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan KSP/USP yaitu penerapan

kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi. Sasaran yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan, terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh serta terwujudnya koperasi yang akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan ini mendorong koperasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, sebagai Badan Usaha yang kredibel berdasarkan Prinsip Koperasi, menjaga dan melindungi asset koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi terhadap pihak yang berkepentingan dan menjadi kuat, sehat, mandiri, dan Tangguh.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga dan melindungi asset koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan serta mendorong pengelolaan koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan disamping kegiatan langsung di lembaga koperasi bersangkutan juga dilaksanakan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis sebagai wujud pelaksanaan bimbingan lanjutan setelah pelaksanaan teknis dilapangan.

- 3) **PROGRAM PENILIAN KESEHATAN KSP/USP**, Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 67.804.324 realisasi sebesar Rp 65.068.198 atau 95,96% dan realisasi fisik 100%. Program ini dapat tercapai dengan melaksanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

**🚩 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, (1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 67.804.324 realisasi sebesar Rp 65.068.198 atau 95,96% dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini dapat tercapai dengan melaksanakan penilaian kesehatan ke 50 koperasi yang dijadikan sampel penilaian di Kabupaten Buleleng.

Adapun aspek - aspek penilaian kesehatan koperasi meliputi aspek permodalan, kualitas, produktifitas, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jati diri koperasi. Pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi yang memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam (USP), wajib dan dilaksanakan minimal setahun sekali yang dilaksanakan setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penilaian kesehatan KSP/USP dan Koperasi ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor : 06/Per.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Tujuan dari pelaksanaan penilaian kesehatan terhadap koperasi ini adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi.
3. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelola kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

#### **4) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN,**

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 310.900.622 realisasi sebesar Rp 272.310.726 atau 87,59% dan realisasi fisik 100%. Program ini dapat tercapai dengan melaksanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

- ✚ **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, (1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi.** Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi sehingga pengelolaan koperasi semakin berkualitas dan dapat meningkatkan kualitas Koperasi. Kegiatan ini dapat tercapai dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dengan anggaran sebesar Rp 67.804.324 realisasi sebesar Rp 272.310.726 atau 87,59% dan realisasi fisik 100%. Pendidikan dan pelatihan koperasi merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah

pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota, pengurus, pengawas, atau karyawan dalam bidang pengetahuan perkoperasian, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kegiatan dan usaha.

Maksud dan tujuan diselenggarakan pendidikan dan pelatihan koperasi adalah sebagai berikut :

1. Memahami prinsip dasar pengelolaan koperasi yang baik dan benar.
2. Meningkatkan pengetahuan pengurus, pengawas, pengelola koperasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Meningkatkan pemahaman tentang model bisnis koperasi sehingga dapat mengelola dan mencari peluang usaha koperasi, Meningkatkan kemampuan pengurus, pengawas dan pengelola dalam menjalankan Rapat Akhir Tahun dengan baik.
4. Meningkatkan kemampuan pengurus, pengawas, dan pengelola untuk membuat perencanaan strategis koperasi dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi.
5. Meningkatkan kemampuan pengurus, pengawas, dan pengelola tentang tata cara membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan baik dan benar sehingga RAT dapat dilaksanakan tepat waktu.
6. Meningkatkan keterampilan pengurus, pengawas dan pengelola dalam menganalisa laporan keuangan koperasi.

**5) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI,**

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 107.078.425 realisasi sebesar Rp 98.804.532 atau 92,27% dan realisasi fisik 100%. Program ini dapat tercapai dengan melaksanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

- **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, (1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota** anggaran sebesar Rp 107.078.425 realisasi sebesar Rp 98.804.532 atau 92,27% dan realisasi fisik 100%. Rincian pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut :

**📌 Pendampingan.**

Kegiatan pendampingan Manajemen Usaha koperasi yang mengelola usaha di sektor riil/pertokoan di Kabupaten Buleleng tahun 2021

dilaksanakan sebanyak 3 kali terhadap 7 (tujuh) koperasi sektor riil dengan mengundang narasumber dari Konsultan Retail Bali Luh Putu Rupani, SE beserta tim. Adapun report atau hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

1. **Kegiatan Pendampingan 1**, dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 3 Maret 2021, diikuti oleh 7 koperasi yaitu :

- ✓ Koperasi Pemasaran Teja Amertha Dewata Br.Dinas Bengbeng Ds.Tejakula Kec.Tejakula. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di Koperasi Pemasaran Teja Amertha Dewata, goal dari pendampingan bagaimana garam palungan Tejakula bisa memperoleh SNI dan IG, kami mohon bantuan mengenai kelengkapan administrasi perijinan PIRT untuk pengolahan ikan, dan mengenai pengrajin pandai, mohon bantuan dimana ada tempat membeli plat kuningan yang murah.
- ✓ Koperasi Pemasaran Krama Bali Sejahtera Bali Mula Br.Dinas Panjangan Ds.Les Kec.Tejakula. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di Koperasi Pemasaran Krama Bali Sejahtera Bali Mula, pendampingan menysasar masalah produk juruh yang belum memiliki ijin PIRT, dan rencana selanjutnya akan mencari ijin PIRT, sambil melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan ijin PIRT.
- ✓ KUD.Karma Bumi Amertha Ds.Kubutambahan Kec.Kubutambahan. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di KUD. Karma Bumi Amertha, bagaimana upaya kita meningkatkan omzet dengan memperbaiki pajangan, bagaimana membuat laporan karena kita disini jualan grosir, mengenai permodalan dari stok lama 327 dibebani hutang barang terbakar lagi 263.
- ✓ KPN.Susila Bhakti Ds.Sangsit Kec.Sawan. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di KPN. Susila Bhakti, toko agar di atur agar lebih menarik, carikan solusi biar harga sama dengan toko yang lain, agar lebih diketahui umum perlu pemasangan spanduk, dan produk/barang perlu di pajang di depan sehingga lebih mudah dilihat oleh masyarakat, dan upayakan fotocopy mudah di lihat oleh masyarakat.
- ✓ KPN.Werdhi Yasa Jln.Bisma Singaraja Kec.Buleleng. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di KPN. Werdhi Yasa Membahas tentang display barang dan omzet per bulan.
- ✓ Koperasi Produsen Mekar Sari Nadi Br.Dinas Buyan Ds.pancasari Kec.Sukasada. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di

Koperasi Produsen Mekar Sari Nadi, Kop.Produsen Mekar Sar Nadi diharapkan bisa memasarkan produk turunan dari hasil pertanian anggota terutama produk cabai paprika dan cabai keriting dalam bentuk serbuk cabai yang bisa di packing dan dipasarkan di pasar lokal ataupun di ekspor ke negara yang membutuhkan, diperlukan pelatihan dan pengadaan alat pendukung untuk bisa melakukan pemasaran produk.

- ✓ Koperasi Pemasaran Buana Amerta sari Br.Dinas sepag Ds.Busungbiu Kec.Bususngbiu. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di Koperasi Pemasaran Buana Amerta Sari, dan rencana pembuatan citra rasa kopi, pengemasan dan pemasaran serta rencana pengurusan PIRT.

2. **Kegiatan Pendampingan 2**, dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021 diikuti oleh Koperasi Unit Desa Dharma Prawerthi Desa Tejakula Kec.Tejakula. Materi pendampingan Display produk UKM Mart di KUD.Dharma Prawerthi Tejakula 1 OJ. Hasil dari pendampingan terhadap Koperasi Unit Desa Dharma Prawerthi, yaitu : (1) Display produk UKM Mart di KUD.Dharma Prawerthi Tejakula : penempatan produk yang dijual agar sesuai dengan klasifikasi produk yang di jual, pengetahuan secara teori untuk mengetahui perbedaan antara toko modern dengan toko tradisional; (2) KUD. Dharma Prawerthi akan dijadikan Roll Model (percontohan untuk koperasi yang lain ) , respon lambat harus dirubah polanya, display, stok opname, produk ( inti dari pertokoan koperasi ) PIRT IUMK Ijin produk koperasi produksi atau perorangan dan garansi : BPOM; (3) Banyak kendala yang dialami di lapangan harus dapat diubah step by step, dimulai dari modal usaha, sistem pelayanan serta tata cara pemajangan produk harus diatur sedemikian rupa sehingga lebih rapi dan memudahkan konsumen saat berbelanja.

3. **Kegiatan Pendampingan 3**, dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 2 Juli 2021, diikuti oleh 5 Koperasi, yaitu :

- ✓ Koperasi Pemasaran Teja Amertha Dewata Br.Dinas Bengbeng Ds.Tejakula Kec.Tejakula. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di Koperasi Pemasaran Teja Amertha Dewata, goal dari pendampingan bagaimana garam palungan Tejakula bisa

memperoleh SNI dan IG, kami mohon bantuan mengenai kelengkapan administrasi perijinan PIRT untuk pengolahan ikan, dan mengenai pengrajin pandai, mohon bantuan dimana ada tempat membeli plat kuningan yang murah.

- ✓ Koperasi Pemasaran Krama Bali Sejahtera Bali Mula Br.Dinas Panjangan Ds.Les Kec.Tejakula. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di Koperasi Pemasaran Krama Bali Sejahtera Bali Mula, pendampingan menysasar masalah produk juruh yang belum memiliki ijin PIRT, dan rencana selanjutnya akan mencari ijin PIRT, sambil melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan ijin PIRT.
- ✓ KUD.Karma Bumi Amertha Ds.Kubutambahan Kec.Kubutambahan. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di KUD. Karma Bumi Amertha, bagaimana upaya kita meningkatkan omzet dengan memperbaiki pajangan, bagaimana membuat laporan karena kita disini jualan grosir, mengenai permodalan dari stok lama 327 dibebani hutang barang terbakar lagi 263.
- ✓ Koperasi Produsen Mekar Sari Nadi Br.Dinas Buyan Ds.pancasari Kec.Sukasada. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di Koperasi Produsen Mekar Sari Nadi, Kop.Produsen Mekar Sar Nadi diharapkan bisa memasarkan produk turunan dari hasil pertanian anggota terutama produk cabai paprika dan cabai keriting dalam bentuk serbuk cabai yang bisa di packing dan dipasarkan di pasar lokal ataupun di ekspor ke negara yang membutuhkan, diperlukan pelatihan dan pengadaan alat pendukung untuk bisa melakukan pemasaran produk
- ✓ Koperasi Pemasaran Buana Amerta sari Br.Dinas sepang Ds.Busungbiu Kec.Bususngbiu. Pelaksanaan Pendampingan koperasi sektor riil di Koperasi Pemasaran Buana Amerta Sari, dan rencana pembuatan citra rasa kopi, pengemasan dan pemasaran serta rencana pengurusan PIRT.

#### Studi Tiru

1. **Studi Tiru Ke Koperasi Kakao Kerta Semaya Samania Di Kabupaten Jembrana Tanggal 22 Nopember 2021.** Hasil dari pelaksanaan kegiatan studi tiru, yaitu :

- Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jembrana yang diwakili oleh Kasi Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi I Komang Agus Ardita dengan arahan dari Dinassudah mengadakan pembinaan ke koperasi mencari pemecahan masalah yang ada di koperasi dan juga disampaikan dari Pemerintah Daerah telah memberikan dana talangan ke koperasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang ada di Kabupaten Jembrana, dimana dana talangan tersebut digunakan untuk membantu para petani kakao untuk memberikan efek baik kepada petani yang diberikan diakhir tahun dan dikembalikan di akhir tahun juga dengan artian retribusi dibayarkan diakhir tahun sekitar 2% dan dana talangan berjalan dengan baik.
- Koperasi Produksi Kakao Kerta Semaya Samania Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk Desa Nusasari Kec.Melaya Kab.jembrana yang diterima oleh sekretaris koperasi dan bagian marketing.
- Koperasi ini berdiri pada tahun 2009, sempat tersendat selama 2 tahun dan kembali bangkit pada tahun 2011 melauai program Kalimajari dari Provinsi untuk perkembangan Koperasi kakao yang ada di Desa Nusasari.
- Untuk mengalami kendala produk petani dibuatkan program Sektor Riil dengan tugas mengembangkan pasar, meningkatkan nilai pasardan pengembangan nilai pasar.
- Budidaya yang digunakan di koperasi kakao adalah pasar ekspor, berkualitas, standarisasi kualitas dan bersertifikat.
- Tahun 2018 lebih intens di kelembagaan dan pendampingan koperasi belajar bisnis bercermin dari kegagalan sebelumnya menyusun organisasi koperasi.
- Ekspor paling besar yang pernah likalikan adalah ke Belanda, Perancis, Belgia, Jepang, Amerika dan Lokal Lampung, Jakarta dan Bali.
- Pemasaran oleh marketing menggunakan link dengan Program Valrhona, portal list minim ke Perancis dengan 3 cara yaitu : sertifikasi dari Belanda link dunia, jasa Bbantuan dari duta/konsultan) , event-event bergengsi (tahun 2017 menjadi 50 besar coklat terbaik di dunia).

- Sistem Pengiriman dengan kargo , pihak ketiga langsung ke Surabaya, Tanjung Priuk , pihak beacukai yang langsung datang ke koperasi.

**2. Studi Tiru Ke Koperasi Tani Mertanadi Di Kabupaten Badung Tanggal 23 Nopember 2021** Hasil dari pelaksanaan kegiatan studi tiru, yaitu :

- Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Jembrana yang diwakili oleh Kasi Binus Koperasi Produksi dan Konsumen Ir. I Gusti Ayu Putu Putri dan Kasi Bina Usaha KSP/USP dan Perijinan KSP/USP Drs. Gusti Nyoman Rasmawan menerima kehadiran rombongan Disdagperinkopukm Kab.Buleleng.
- Koperasi Tani Mertanadi dengan alamat Br.Bukian Ds.Pelaga Kec.Petang Kab.Badung merupakan koperasi yang mempunyai 1 unit usaha di bidang pertanian dengan produk unggulan sayur yaitu asparagus.
- Koperasi ini berdiri tahun 2010, dengan jumlah anggota 117 dengan melakukan kerjasama OVO di 2 Kabupaten Badung dan Bangli. kerjasama dilakukan dengan Mr. Su Tien Chi dari Taiwan melakukan penanaman asparagus sebanyak 20 are di daerah Bukian. oleh Mr. Su pengurus koperasi tani Mertanadi diajak untuk melihat pemasaran produk, masuk pasar, packaging, hingga ke supermarket.
- Tahun 2012 telah bekerja sama dengan distributor Asparagus jakarta, Bogor dan Malang. Bantuan sarana operasional di dapat dari ICDF Taiwan berupa pickup dan mobil box dari Pemkab Badung.
- Trik pemasaran dengan Youtube dan Facebook.
- Di masa yang akan datang diharapkan bisa terjalin kerjasama antara pemerintah Kabupaten Buleleng dan Badung terkait penyaluran asparagus untuk mensuplai kebutuhan sektor pariwisata seperti hotel dan restoran di Buleleng dan begitupula sebaliknya.

**3. Studi Tiru Ke Koperasi Produsen Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Amed Bali Di Kabupaten Karangasem Tanggal 24 Nopember 2021.** Hasil dari pelaksanaan kegiatan studi tiru, yaitu :

- Dinas Koperasi dan UKM Kab. Jembrana yang diwakili oleh Kasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi merangkap Plt.Kabid. Koperasi, UKM Kab.Karangasem I Nyoman Suarjana, S.Sos., Kasi Kelembagaan dan Ijin Usaha SP Koperasi I Komang Suwitra,SE, Plt. kasi Aneka Usaha Koperasi I Nengah Sika,SE, Ni Nyoman Suartini,SH, I Kadek Ferdi, S.Pd, PPKL I Gusti Indrajaya,SE.Ak.
- Koperasi Produsen MPIG berdiri pada tanggal 26 September 2019 dengan nomer Badan Hukum 015191/BH/M.KUKM.2/IX/2019 beranggotakan 35 orang yang berprofesi sebagai sebagai petani garam, diantaranya 24 petani yang berijin IG (Indikasi geografis) yang terbentuk dari letak geografis yang telah di atur dari pihak berwenang yang memiliki kontrol sehingga suatu daerah dapat memiliki ijin IG. Identifikasi Geografis ini merupakan langkah awaluntuk kemajuan koperasi, karena jika tidak ada promosi produk ini tidak akan berjalan.
- Produk garam Amed ini sering diundang dalam event-event pameran di Yogyakarta dan DKI Jakarta, sehingga testimoni poduk langsung keluar. Ada bantuan dari pemerintah Swiss dan Indonesia melalui program ISIF yang datang sebagi konsultan sahabat fontura dan berakhir pada tahun 2019. ISIF memfasilitasi pameran ke Jakarta dengan buyer-buyernya yang berkedudukan di Jakarta dengan lembaga WLP sebagai konsultan dari tahun 2019-2021 dengan pendampingan secara gratis.
- Pemasaran digital dilakukan secara online seperti Youtube, Shopee, Facebook dll.
- Selain itu dalam pemasaran telah bekerjasama dengan Depok, kemang, malang, Tangerang, jakarta, PT.Karisma Jawara Abadi, Alila. Untuk Bali di masa pandemi covid-19 ini hanya berkisar 5-10 kg sebanyak 3x seminggu seperti Hotel Hilton dan restoran lainnya.
- Dari Disdagperinkopukm Kab.buleleng hadir Kabid Koperasi, Kasi , staf dan PPKl . Kali ini lebih menekankan sharing usaha

agar di kemudian hari Para Petani Garam yang ada di Kabupaten dapat memperoleh ijin IG, dimana IG sudah menjadi target utama dalam pemasaran produk khususnya garam. Hal ini sesuai dengan hasil pendampingan oleh Konsultan Retail Bali Luh Putu Rupani,SE bahwasanya ijin IG ini sangat penting untuk produk garam di Buleleng.

- MPIG beranggotakan 36 petani garam, yang aktif sekitar 24 petani. SHU masih minim dimana hasil produksi dan penjualan mengalami penurunan pada tahun lalu akibat pandemi covid 19.
- Sebelum memiliki sertifikat IG harga garam berkisar Rp.2000/kg namun setelah memiliki sertifikat IG harga garam naik menjadi Rp.20.000/kg.

**4. Studi Tiru Ke Koperasi Produsen Giri Amerta Sari Di Kabupaten Klungkung Tanggal 25 Nopember 2021.** Hasil dari pelaksanaan kegiatan studi tiru, yaitu :

- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Klungkung yang diwakili oleh Kepala Bidang kelembagaan dan Pengawasan Ni Nengah Mastrini, SH dan Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Ni Nyoman Muliani dan rombongan.
- Koperasi Giri Amerta Sari di hadiri oleh Ketua Koperasi I Wayan Santika, S.Pd.M.Pd, Pengawas I Wayan Arsana dan pengurus lainnya. Koperasi ini berdiri pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan BH : AHU-0005986.AH.01.26.TAHUN 2020. dengan alamat Dusun Swelagiri, Desa aan Kec.Banjarrangkan Kab.Klungkung Provinsi Bali. jumlah anggota pendiri 20 orang dan 5 anggota tambahan dengan volume usaha saat ini Rp.4.500.000,00 per bulan.
- Usaha yang dimiliki Koperasi Giri Amerta sari yaitu sabun, VCO, madu Kele/trigona, budidaya, wisata kuliner dan permainan, dengan produk unggulan berbahan dasar propolis dari madu kele.
- Pengembangan usaha untuk saat ini masih sering berkomunikasi dengan para anggota untuk mencari solusi pemecahan masalah, untuk permodalan telah bekerjasama dengan Pemdes. Dari Dinas Pariwisata mendapat Hibah Rp.600.000.000,-, CSR dari PLN sebanyak 2x sebesar Rp.70.000.000,- dan Rp.40.000.000,-. Kemitraan masih menggunakan modal luar seperti sabun sumber BPPT Kementrian Riset dan teknologi, untuk ijin sudah ada PIRT,

BPOM, dan izin Halal untuk madu kele. bantuan dari Dinas Perpustakaan seperti Taman Bacaan, dari Politeknik Negeri Bali berupa PKM, Bansos, Kincir Air untuk energi listrik.

- Untuk pemasaran mengadakan MoU dengan distributor dari Denpasar dan Karangasem untuk sabun kecantikan dan via online untuk madu kele.

**5. Studi Tiru Ke Koperasi Simpan Pinjam Setia Bali Di Kabupaten Tabanan Tanggal 26 Nopember 2021.** Hasil dari pelaksanaan kegiatan studi tiru, yaitu :

- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tabanan diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Gusti Puu Widiadnyana, Kasi Fasilitasi Uaha Koperasi I Nengah Suryawan, SS dan staf.
- Koperasi Setia Bali dari segi aspek kelembagaan mempunyai Badan Hukum : 1/BH/XXVII.8/2013, tanggal 5 Juli 2013 alamat Jalan Bangsing Cantel banjar Mundeh Desa Mundeh Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan memiliki anggota inti 20 orang yang terdiri dari 5 kelompok. Saat ini jumlah anggota 234 orang, aset Rp.1.373.356.433p. 1.281.780,- dan SHU Rp.73.010.000,-
- Jenis produk unggulan yaitu pengolahan bahan manggis, pengembangan produk usaha Koperasi Setia Bali berupa buah manggis diharapkan menjadi Role Model untuk koperasi yang ada di Kabupaten Tabanan maupun Bali untuk ekspor buah manggis.
- Pemasaran skala lokal maupun ekspor ke berbagai negara seperti Cina, Australia, Thailand, Malaysia dll. Pengiriman dilakukan melalui jalur darat maupun laut. Sampai ke Cina dengan sistem Dito Sanitasi dan COO (Certifikat of Original) dengan kapal laut diperlukan waktu selama 14 hari sehingga produk masih fresh.
- Disdagperinkopukm yang diwakili Kabid Koperasi Made Wiyagra, SE menyampaikan terimakasih karena telah diterima dengan baik di Koperasi Setia Bali dan diharapkan nantinya produksi buah manggis di Kab. Buleleng akan dapat meniru/menerapkan sistem pengolahan seperti dipakai di Koperasi Setia Bali.

#### **1.4.2 Faktor Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja pada Sasaran 4 “Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas”**

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Tahun 2021 di dukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, KSP/USP.
2. Meningkatnya kualitas SDM koperasi melalui diklat perkoperasian.
3. Melaksanakan pendampingan Koperasi Usaha Retail/Sektor Riil dan Studi Tiru.
4. Terjalannya kerjasama antar lembaga keuangan.
5. Meningkatnya koperasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 1.5 Sasaran Strategis 5 : “Terwujudnya UMKM yang Mandiri”

Pada Sasaran Strategis ketiga ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang telah terukur dengan rumus atau formula tertentu. Tingkat Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Koperasi yang Berkuaitas akan diuraikan, sebagai berikut :

**Tabel 3. 10 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	26%	26%	100%
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	1,3%	1,3%	100%

**Tabel 3. 11 Program Pendukung Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 5**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>206.724.200</b>	<b>201.724.162</b>	<b>97,58%</b>
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	206.724.200	201.724.162	97,58%
			- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	270 UMKM	270 UMKM	100%	206.724.200	201.724.162	97,58%
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>581.314.950</b>	<b>572.630.528</b>	<b>98,51%</b>
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui	100%	100%	100%	581.314.950	572.630.528	98,51%

			Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						
			- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	916 UMKM	916 UMKM	100%	88.476.945	86.485.528	97,75%
			- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	50 UMKM	50 UMKM	100%	57.221.980	55.655.452	97,26%
			- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	60 Pelaku UMKM	60 Pelaku UMKM	100%	227.506.000	226.463.900	99,54%
			- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5 Central	5 Central	100%	208.110.025	204.025.648	98,04%
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>57.521.100</b>	<b>56.285.012</b>	<b>97,85%</b>
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	45 Produk/ 90 UMKM	45 Produk/ 90 UMKM	100%	57.521.100	56.285.012	97,85%

			-	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				57.521.100	53.005.448	92,15%
<b>TOTAL</b>								<b>845.560.250</b>	<b>802.039.520</b>	<b>94,85%</b>

### 1.5.1 Analisis Sasaran Strategis 5 “Terwujudnya UMKM yang Mandiri”

Sasaran strategis “Terwujudnya UMKM yang Mandiri” ini di dukung oleh 2 indikator sasaran yaitu Persentase UMKM yang Formal dan Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya, yang dimana untuk mencapai sasaran strategis tersebut dapat dilaksanakan dengan program/kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan atau tercapainya sasaran tersebut diatas. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dan indikator sasaran, antara lain :

#### 1. Indikator Sasaran 1 : Persentase UMKM yang Formal

Indikator sasaran pertama yaitu Persentase UMKM yang Formal. Pada tahun 2021 jumlah total seluruh UMKM di Kabupaten Buleleng sebanyak 38.000 UMKM yang terdiri dari 9.958 UMKM Formal dan 28.042 UMKM Non Formal.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 ini menargetkan Persentase UMKM yang Formal sebesar 26% dengan realisasi sebesar 26% atau fisik 100%. Keberhasilan capaian pada indikator ini didukung dengan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagaimana berikut :

1) **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).** Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 206.724.000 realisasi anggaran sebesar Rp 201.724.162 atau 97,58% dan fisik 100%. Program ini dapat tercapai dengan melaksanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

**🚩 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, (1) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro,** kegiatan dan sub kegiatan ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp 206.724.000 realisasi anggaran sebesar Rp 201.724.162 atau 97,58% dan fisik 100%.

#### 2. Indikator Sasaran 2 : Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya

Indikator sasaran kedua yaitu Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya. UMKM yang meningkat statusnya adalah wirausaha dan usahanya yang mampu meningkatkan jumlah asset, tenaga kerja, serta pendapatan usahanya setiap tahunnya dengan penerapan mekanisme pengelolaan usaha yang taat peraturan, sistem

manajemen profesional, SDM yang handal dan produk/jasa yang inovatif berkualitas untuk dapat bersaing secara nasional dan internasional.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 ini menargetkan sebesar 1,3% dan terealisasi 1,3%, sehingga mengalami capaian target realisasi sebesar 100%. Keberhasilan capaian pada indikator sasaran ini didukung dengan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 5 sub kegiatan sebagaimana berikut :

1) **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).** Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 581.314.950 realisasi anggaran sebesar Rp 572.630.528 atau 98,51% dan fisik 100%. Program ini dapat tercapai dengan melaksanakan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu :

🚩 **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan,**

- ✓ **Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro,** dengan anggaran sebesar Rp 88.476.945 realisasi 86.485.528 atau 97,75% dan realisasi fisik 100%. Adapun tujuan dilakukan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro ini untuk mendapatkan jumlah pelaku UMKM secara akurat dan riil, sekaligus melihat perkembangan kondisi baik usaha mikro maupun usaha kecil dan menengah di Kabupaten Buleleng.
- ✓ **Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro,** dengan anggaran sebesar Rp 57.221.980 realisasi Rp 55.655.452 atau 97,26% dan realisasi fisik 100%.
- ✓ **Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro,** dengan anggaran sebesar Rp 227.506.000 realisasi sebesar Rp 226.463.900 atau 99,54% dan fisik 100%. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tetap konsisten dalam memberdayakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan Festival Kopi dan Gebyar Kuliner Buleleng yang di barengi dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Buleleng. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ini dilaksanakan 2 kali yaitu

pelatihan barista oleh IBA dan IFBEC Buleleng, serta pelatihan pelaku UKM Kuliner Buleleng yang dibina oleh Bali Chef Community.

✚ Festival Kopi dan Pelatihan Barista oleh IBA dan IFBEC



✚ Gebyar Kuliner dan Pelatihan UKM Kuliner Buleleng oleh Bali Chef Community



✓ **Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro**, dengan anggaran sebesar Rp 208.110.025 realisasi sebesar Rp 204.025.648 atau 98,04% dan realisasi fisik 100%.

2) **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 57.521.100 realisasi anggaran sebesar Rp 56.285.012 atau 97,85% dan realisasi fisik 100%. Program ini dapat tercapai dengan melaksanakan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu : **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**, sub kegiatan (1)

### **Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.**

Program/kegiatan/sub kegiatan ini dapat tercapai dengan melaksanakan pameran produk UMKM yang dimana pameran produk ini bertujuan sebagai sarana untuk melakukan promosi dan unjuk kreasi para pelaku UMKM, peluang meraih transaksi bisnis dalam bentuk penjualan langsung maupun order jangka panjang bagi pelaku UMKM, memperluas jaringan pemasaran, pengembangan kreatifitas serta menambah wawasan dan informasi bagi pelaku umkm. Dalam rangka pemasaran hasil produksi pengusaha kecil dan menengah, bidang Pengembangan Usaha Mikro (PUM) melaksanakan promosi obat tradisional yang bertempat di parkir Kantor Gubernur Provinsi Bali selama 1 minggu. Kegiatan promosi ini diikuti oleh 4 UMKM yang memiliki produk olahan obat herbal, antara lain :

- BULHAR (Buleleng Harmoni)
- Panji Herbal
- Tombak Pusaka
- Bali Pure

#### **1.5.2 Faktor Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja pada Sasaran 5 “Terwujudnya UMKM yang Mandiri”**

1. Tersedianya data UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Terlaksananya Festival Kopi dan Gebyar Kuliner.
3. Tersedianya SDM yang berkualitas dengan adanya pelatihan kewirausahaan berupa Pelatihan Barista oleh IBA dan IFBEC serta Pelatihan Pelaku UKM Kuliner Buleleng oleh Bali Chef Community.
4. Tersedianya akses permodalan dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
5. Terlaksananya Bantuan Stimulus Usaha (PBSU) bagi Pelaku Usaha Mikro yang terdampak wabah pandemi *covid-19*.
6. Terselenggaranya promosi produk UMKM berupa obat tradisional.

### C. PROGRAM PENUNJANG

Program penunjang urusan perdagangan ini dilaksanakan 1 program dengan anggaran Rp 6.837.147.533 realisasi anggaran sebesar Rp 6.677.860.929 atau 97,67% realisasi fisik 100% diantaranya adalah :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan				Fisik		
		Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian (%)	Sisa	Target	Realisasi	Capaian (%)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.837.147.533</b>	<b>6.677.860.929</b>	<b>97,67%</b>	<b>159.286.604</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>101.694.576</b>	<b>86.731.400</b>	<b>85,29%</b>	<b>14.963.176</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.694.576	86.731.400	85,29%	14.963.176	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.746.648.761</b>	<b>5.710.191.632</b>	<b>99,37%</b>	<b>36.457.129</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.712.832.935	5.678.883.262	99,41%	33.949.673	14 Bulan	14 Bulan	100%

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.815.826	31.308.370	92,58%	2.507.456	12 Laporan	12 Laporan	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>212.961.700</b>	<b>169.995.300</b>	<b>79,82%</b>	<b>42.966.400</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.800.000	69.821.500	95,91%	2.978.500	3 Jenis	3 Jenis	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.022.200	38.767.400	66,81%	19.254.800	3 Jenis	3 Jenis	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.387.500	6.370.000	99,73%	17.500	4 Jenis	4 Jenis	100%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.624.000	9.300.000	59,52%	6.324.000	4 Jenis	4 Jenis	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.128.000	45.736.400	76,07%	14.391.600	12 Bulan	12 Bulan	100%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>635.688.596</b>	<b>601.744.597</b>	<b>94,66%</b>	<b>33.943.999</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.037.897	41.570.410	98,89%	467.487	2.500 Surat	2.500 Surat	100%

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.360.000	162.862.262	89,80%	18.497.738	4 jenis	4 jenis	100%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.223.334	230.943.665	96,54%	8.279.669	2 Unit	2 Unit	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.067.365	166.368.260	96,13%	6.699.105	20 Jenis/ 1 Paket/ 4 Jenis/ 3 Orang	20 Jenis/ 1 Paket/ 4 Jenis/ 3 Orang	100%
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>140.153.900</b>	<b>109.198.000</b>	<b>77,91%</b>	<b>31.955.900</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>
		Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.333.900	90.099.000	80,93%	22.234.900	44 Unit/ 2 Jenis	44 Unit/ 2 Jenis	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan kantor	28.820.000	19.099.000	66,27%	9.721.000	1 Jenis	1 Jenis	100%
<b>TOTAL</b>			<b>6.837.147.533</b>	<b>6.677.860.929</b>	<b>97,67%</b>	<b>159.286.604</b>			

#### D. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2021

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021 ini mendapat alokasi anggaran APBD sebesar **Rp 10.506.920.831,00** dan Realisasi **Rp 10.233.445.125,00** atau **97,39%**.. Uraian untuk anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 3.12, sebagai berikut:

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

No.	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>5.712.832.935</b>	<b>5.678.883.262</b>	<b>99,40%</b>
	- Belanja Pegawai	5.712.832.935	5.678.883.262	99,40%
2.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>4.794.832.935</b>	<b>4.554.561.863</b>	<b>95,00%</b>
	- Belanja Barang dan Jasa	4.516.287.896	4.279.740.363	94,76%
	- Belanja Hibah	205.000.000	205.000.000	100%
	- Belanja Modal	72.800.000	69.821.500	95,90%
<b>Jumlah 1 + 2</b>		<b>10.506.920.831</b>	<b>10.233.445.125</b>	<b>97,39%</b>

## E. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berdasarkan data capaian kinerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, adapun analisis dari efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

### 1. Anggaran

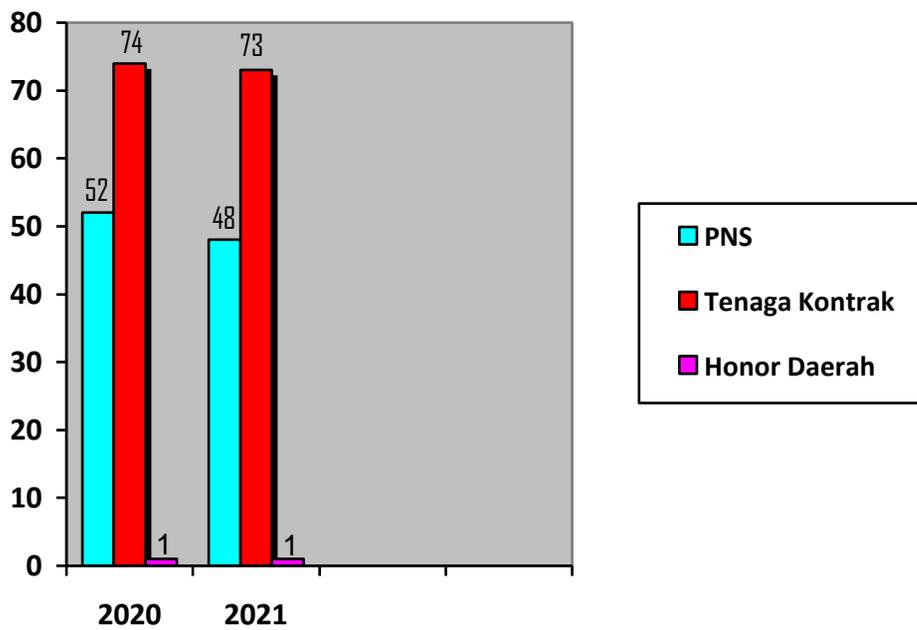
Anggaran dalam DPA Induk Tahun 2021 telah dilakukan refocusing anggaran (pengurangan) terkait dengan efisiensi anggaran pada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi kegiatan berjalan. Data efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.13 Tabel Efisiensi Anggaran

No.	Belanja Daerah	Pagu (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
1	<b>Belanja Tidak Langsung (1)</b>	<b>5.716.271.000</b>	<b>5.712.832.935</b>	<b>(3.438.065)</b>	<b>(0,06)</b>
1.1	Belanja Pegawai	5.716.271.000	5.712.832.935	(3.438.065)	(0,06)
2	<b>Belanja Langsung (2)</b>	<b>5.108.259.296</b>	<b>4.794.832.935</b>	<b>(313.426.361)</b>	<b>(6,54)</b>
2.1	Belanja Barang Dan Jasa	4.863.659.296	4.516.287.896	(347.371.400)	(7,69)
2.2	Belanja Hibah	205.000.000	205.000.000	-	-
2.3	Belanja Modal	39.600.000	72.800.000	33.200.000	45,60
<b>Total Pagu (1+2)</b>		<b>10.824.530.296</b>	<b>10.506.920.831</b>	<b>(317.609.465)</b>	<b>(3,02)</b>

## 2. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang berstatus PNS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, karena banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun. Namun demikian dengan jumlah sumber daya manusia baik yang berstatus PNS maupun Non PNS yang ada telah dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



## F. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dari sasaran yang ingin dicapai, telah ditetapkan beberapa indikator sebagai Indikator Kinerja Utama. Adapun target dan realisasi capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Utama ( IKU )  
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Buleleng Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Rata-rata Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	Jumlah Pasar Kondisi Baik	81 Pasar	81 Pasar	100%	Sangat Berhasil
		Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	55%	55%	100%	Sangat Berhasil
		Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	81%	81%	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	80%	80%	100%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	76,79%	76,79%	100%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	77,5%	77,5%	100%	Sangat Berhasil
5	Terwujudnya UMKM yang Mandiri	Persentase UMKM yang Formal	26%	26%	100%	Sangat Berhasil
		Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	1,3%	1,3%	100%	Sangat Berhasil

Pencapaian sasaran strategis dan pencapaian hasil IKU disebabkan oleh peran serta dari masyarakat dan para pelaku usaha serta didukung program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

**Perbandingan Pencapaian atau Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020 dengan 2021**

No	Tujuan	Tahun 2020				Tahun 2021						
		Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Rata-rata Capaian (%)		
1	Terwujudnya Sektor Perdagangan, Perindustrian, operasi dan UMKM yang Berdaya Saing	1	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	- Jumlah Pasar Kondisi Baik	78 Pasar	78 Pasar	1	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang Berkualitas	- Jumlah Pasar Kondisi Baik	81 Pasar	81 Pasar	100%
				- Persentase PKL Tata Kelola sesuai Aturan	54,91%	54,91%			- Persentase PKL Tatat Kelola sesuai Aturan	55%	55%	100%
				- Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	80%	80%			- Persentase Kepatuhan Pasar Rakyat/Pasar Modern Pengendalian BDKT dan B2	81%	81%	100%
		2	Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	- Persentase IKM yang Berijin	1,50%	1,50%	2	Meningkatnya Sektor Perindustrian yang Mandiri	- Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	80%	80%	100%
				- Persentase IKM yang Meningkatkan Statusnya	1,50%	1,50%	3	Meningkatnya Industri Berbasis Komoditas Unggulan Daerah	- Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan pada PDRB	76,79%	76,79%	100%
		3	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	- Persentase Koperasi Aktif	85,50%	83,25%	4	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	- Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	77,50%	77,50%	100%
				- Persentase Koperasi Sehat/Cukup Sehat	77%	77%			-	-	-	-
		4	Terwujudnya UMKM yang Mandiri	- Persentase UMKM yang Formal	25%	25%	5	Terwujudnya UMKM yang Mandiri	- Persentase UMKM yang Formal	26%	26%	100%
				- Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	1%	1%			- Persentase UMKM yang Meningkatkan Statusnya	1,3%	1,3%	100%



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja menuju *Good Governance* dengan mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng dan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Sebagai Instansi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan kewenangan dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng telah mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021, secara umum sudah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan Usaha kecil dan menengah menunjukkan perkembangan yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik dalam urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah. Adapun permasalahan atau tantangan yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, antara lain :

- 1) Kegiatan pelayanan tera/tera ulang terutama di pasar/desa belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid-19.
- 2) Masih rendahnya kesadaran para pelaku usaha di bidang tertib hukum dan tertib niaga, sehingga masih sering terjadi pelanggaran dilapangan terutama dalam hal tertib ukur, penjualan produk illegal dan produk olahan makanan yang membahayakan kesehatan.
- 3) Masih rendahnya pengetahuan para pedagang tentang perijinan, pengendalian kesehatan serta kewirausahaan.

Langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

- 1) Melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang, pendataan UTTP serta pembinaan dan penyuluhan tertib niaga secara berkelanjutan.
- 2) Melaksanakan pembinaan pedagang secara berkelanjutan.

- 3) Melaksanakan pembinaan Industri Kecil dan Menengah yang dimana tidak hanya fokus kepada Industri Kecil Rumah Tangga akan tetapi lebih jauh berorientasi kepada skala Industri yang lebih besar sehingga dampak yang ditimbulkannya akan lebih bermanfaat bagi peningkatan kesempatan kerja yang pada ujungnya berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Dr. Dewa Made Sudiarta, M.Si

19741014 199311 1 001